

2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN
METODOLOGI SENSUS
DAN SURVEI**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat selama tahun 2021 kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang sejalan dengan visi BPS dan penyelenggaraan kegiatan sasaran strategis yaitu tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2021 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2022.

Jakarta, 27 Januari 2022

Direktur
Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,



Sarpono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	2
1.4.Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
1.5.Potensi dan Permasalahan.....	5
1.6.Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1.Rencana Strategis 2020-2024.....	8
2.2.Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1.Capaian Kinerja Tahun 2021.....	12
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020.....	58
3.3. Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	60
3.4. Prestasi.....	62
3.5. Kegiatan Prioritas 2021	64
3.6. Upaya Efisiensi.....	64
3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2021	65
BAB 4. PENUTUP	67
4.1.Tinjauan Umum.....	67
4.2.Tindak Lanjut.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS.....	3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2021.....	10
Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021 Direktorat PMSS.....	13
Tabel 3.2. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2021.....	16
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.....	29
Tabel 3.4. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2021.....	31
Tabel 3.5. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS.....	40
Tabel 3.6. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS.....	43
Tabel 3.7. Perkembangan Cakupan Pengelolaan Master Wilkerstat.....	48
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Direktorat PMSS Terhadap Target Renstra 2020 dan 2021.....	59
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Direktorat PMSS 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	61
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2021.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Menurut Tingkat Pendidikan.....	5
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	69
Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	70
Lampiran 3. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS.....	73
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2021.....	80
Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2021)...	81
Lampiran 6. Mailing List Publikasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2021	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Tugas Direktorat PMSS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Misi Direktorat PMSS yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Direktorat PMSS. Tujuan pertama adalah terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah:

- a. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
- b. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- c. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
- d. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

Tujuan kedua adalah mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data. Sasaran strategis dari tujuan kedua ini adalah terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2021 Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat PMSS adalah [2900]. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905]. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan [2910]. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Rata-rata capaian sasaran sebesar 100,84 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp 5.189.360.000,- , sementara realisasinya mencapai Rp 4.617.715.806,- (88,99%). Dalam pelaksanaan program Direktorat PMSS tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi.

Secara umum kendala tersebut disebabkan oleh:

- a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- b. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data *Statistical Business Register* (SBR) sehingga dibutuhkan unit kerja khusus untuk menangani SBR.
- c. Kondisi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian desain metodologi yang telah disusun, karena adanya *refocusing* anggaran dan pembatasan kegiatan lapangan. Hal itu juga berdampak pada banyaknya penggantian sampel serta penundaan/pembatalan survei.
- d. Serangan *ransomware* menimbulkan hambatan penyelesaian tugas baik dari persiapan, pelaksanaan dan finalisasi kegiatan, terutama yang terkait dengan akses data dan layanan teknologi informasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat PMSS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit

kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.

- b. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk dapat membentuk unit kerja khusus untuk menangani SBR, dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya Fungsi Pengembangan Register Usaha pada Agustus 2021.
- c. Melakukan penyesuaian desain metodologi survei dan mekanisme pelaksanaan survei pada kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal maupun internal BPS.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan karena melampaui target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100,84 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat PMSS.

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada awal tahun 2021, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS 2021. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Direktorat PMSS kepada Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja, tujuan, dan sasaran Direktorat PMSS selama tahun 2021.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

2. Tugas

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bab IV Pasal 99 adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,
- b. Pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik,
- c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel,
- d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik, dan

- e. Pelaksanaan pengembangan register usaha.

4. Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat PMSS terdiri dari:

- a. Fungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei, terdiri dari tiga Subfungsi, yaitu Subfungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial, Subfungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi, dan Subfungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
- b. Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, terdiri dari dua Subfungsi, yaitu Subfungsi Pengembangan Standardisasi Statistik, dan Subfungsi Pengembangan Klasifikasi Statistik.
- c. Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel, terdiri dari tiga Subfungsi, yaitu Subfungsi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial, Subfungsi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi, dan Subfungsi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
- d. Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik, terdiri dari tiga Subfungsi, yaitu Subfungsi Pengembangan Peta Wilayah, Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah, dan Subfungsi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil.
- e. Fungsi Pengembangan Register Usaha, terdiri dari tiga Subfungsi, yaitu Subfungsi Pengembangan Profil Perusahaan Besar, Subfungsi Pengembangan Kerangka Survei Usaha, Subfungsi Pengembangan Akuisisi Data dan Demografi Usaha,

Secara rinci bagan organisasi Direktorat PMSS terdapat pada Lampiran 1.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Direktorat PMSS yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. IKU yang menjadi implementasi sasaran Direktorat PMSS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS

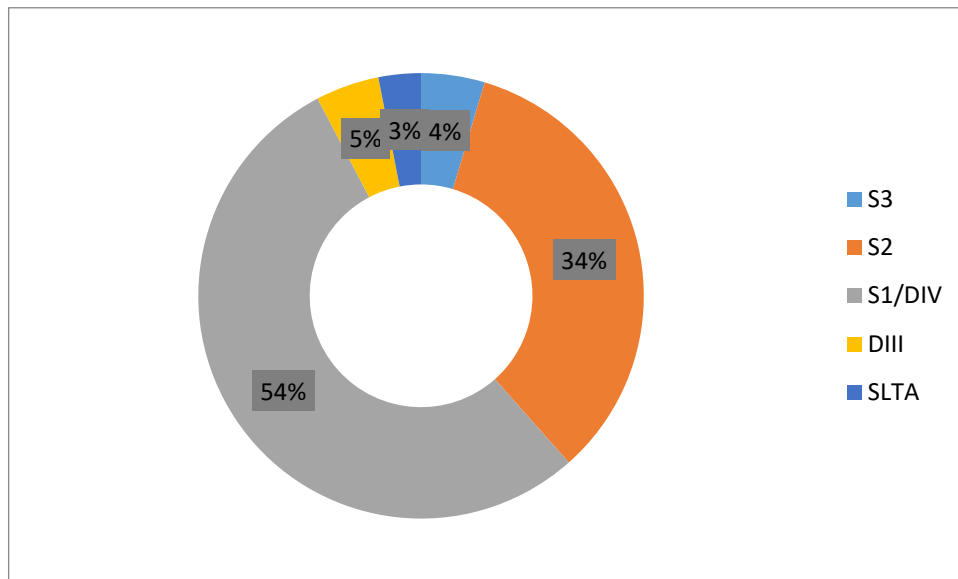
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Laporan Kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir tahun 2021, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 65 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 54 persen. SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 mencapai 38 persen. Hal tersebut mencerminkan kualitas SDM Direktorat PMSS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Tingkat Pendidikan



1.5. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2008 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Namun demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, pemetaan statistik dan register usaha. Direktorat PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang MIS khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Direktorat PMSS mengembangkan penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Peran Direktorat PMSS dalam implementasi SDI menjadi sangat penting. SDI membutuhkan standardisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, metode penyusunan kerangka sampel, dan penarikan sampel.

Potensi yang dimiliki Direktorat PMSS untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. SDM yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran.
- b. Pembentukan unit kerja baru yang difokuskan dalam pengembangan *Statistical Business Register* (SBR) yaitu Fungsi Pengembangan Register Usaha.
- c. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei. Penggunaan penginderaan jarak jauh mulai diujicoba dalam pembuatan kerangka geospasial lahan pertanian. Teknologi ini direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memproduksi statistik pertanian yang lebih efektif.
- d. Tersedianya sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara oleh Direktorat PMSS.
- e. Peningkatan permintaan pembinaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- b. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data SBR sehingga dibutuhkan unit kerja khusus untuk menangani SBR.
- c. Kondisi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian desain metodologi yang telah disusun, karena adanya *refocusing* anggaran dan pembatasan kegiatan lapangan. Hal itu juga berdampak pada banyaknya penggantian sampel serta penundaan/pembatalan survei.
- d. Serangan *ransomware* menimbulkan hambatan penyelesaian tugas baik dari persiapan, pelaksanaan dan finalisasi kegiatan, terutama yang terkait dengan akses data dan layanan teknologi informasi.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PMSS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2021.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2021; perkembangan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja tahun 2020; capaian kinerja tahun 2021 terhadap target renstra 2020-2024; prestasi; kegiatan prioritas 2021; upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 2021.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

LEKEMAHYAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat PMSS mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024.

2.1.1. Misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi yang ditetapkan Direktorat PMSS menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

2.1.2. Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Tujuan Direktorat PMSS, seperti yang tercantum pada Renstra Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024, adalah:

- Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.
- Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.

2.1.3. Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Sasaran strategis Direktorat PMSS dalam mendukung SSN yang memenuhi standar internasional dan mewujudkan SDI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas” adalah:

1. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
 2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
 3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
 4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas;
 5. Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan.
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data”, adalah:
1. Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei;
 2. Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam metodologi sensus dan survei.

2.1.4. Kebijakan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Arah kebijakan penyelenggaraan Direktorat PMSS mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Kedeputan Bidang MIS. Fokus arah kebijakan Direktorat PMSS Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan Kedeputan Bidang MIS terkait layanan metodologi sensus dan survei, sebagai berikut:

- a. Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas;
- b. Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia;
- c. Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- d. Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat;
- e. Penyediaan publikasi *Metropolitan Statistical Area* (MSA); dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

2.1.5. Program Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Untuk dapat mencapai misi yang telah ditetapkan, program kerja kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei tahun 2021 terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah [2900] Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; [2910] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam rangka penyediaan data dan informasi statistik berkualitas, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Tugas utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei adalah mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Pada periode 2021, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas			
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi	4
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100
Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area (MSA)</i>	Publikasi	2
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.			
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan mau pun kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2021 melalui program-program kegiatan diuraikan pada bab ini.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja 2021 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021. Konsep, definisi dan metode penghitungan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Secara umum, kinerja Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100,84 persen selama tahun 2021. Seperti disajikan pada Tabel 3.1, target yang ditetapkan pada semua sasaran strategis dapat tercapai, bahkan ada yang pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu pada sasaran strategis tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran dengan tingkat capaian sebesar 105,88 persen.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Direktorat PMSS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100	100	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100	105,88	105,88
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi / Laporan	4	4	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100,00
Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)	Publikasi	2	2	100,00
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00

Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang baik. Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.

3.1.1 Indikator Kinerja 1: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Pencapaian Direktorat PMSS dalam capaian indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas tidak terlepas dari indikator lain yang saling terkait. Dalam periode 2021, Direktorat PMSS telah menghasilkan 55 dokumen desain sampling sensus dan dokumen 49 dokumen pengukuran sampel. Dimana seluruh dokumen yang dihasilkan merupakan permintaan dari pihak luar Direktorat PMSS, baik itu dari internal BPS (*Subject Matter BPS*) maupun dari eksternal BPS (Kementerian/ Lembaga di luar BPS). Dengan demikian capaian indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas pada tahun 2021 sebesar 100 persen.

Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain survei yang disiapkan untuk masing-masing survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa. Isi dalam dokumen desain ini mencakup antara lain jumlah sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (*sampling weight*), prosedur penghitungan kesalahan sampling (*sampling error*), dan prosedur pengumpulan data.

Capaian sebesar 100 persen ini jika dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan ada peningkatan dari target jumlah dokumen. Desain metodologi yang dihasilkan pada tahun 2021 sebanyak 55 dokumen dari target 49 dokumen. Sedangkan, dokumen

pengukuran sampel yang dihasilkan sebanyak 49 dokumen dari target 44 dokumen. Hal ini dikarenakan ada tambahan permintaan rancangan survei pada tahun berjalan berasal dari lembaga lain. Kegiatan ini dibiayai dengan anggaran dari lembaga yang bersangkutan dengan mekanisme kerjasama swakelola tipe I. Sebagai Pembina statistik sektoral yang menangani bidang metodologi sensus dan survei, tentu hal ini menjadi kewajiban Direktorat PMSS.

Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia pada pertengahan tahun sehingga desain metodologi yang telah disusun harus dilakukan penyesuaian, karena adanya *refocusing* anggaran dan pembatasan kegiatan lapangan.
2. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia), dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan desain survei.
3. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
4. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral, serta kurangnya kesadaran unit kerja terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.

Strategi untuk mengatasi masalah:

1. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
2. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.
3. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mekanisme permintaan layanan di bidang metodologi survei bagi penyelenggara kegiatan statistik (termasuk bagi *subject matter* di BPS).

3.1.2. Indikator Kinerja 2: Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

Tahun 2021, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir diperoleh sebanyak 54 dokumen atau terealisasi menjadi 105,88 persen dibandingkan target yang direncanakan sebanyak 51 dokumen. Penyusunan dokumen tersebut meliputi penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa.

Tabel 3.2. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2021

Sosial	Produksi	Distribusi
1. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel	1. Survei Ubinan Palawija SR1	1. Survei Pola distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas (Poldis)
2. Survei Sosial Ekonomi Nasional	2. Survei Ubinan Palawija SR2	2. Survei Perdagangan Antar Wilayah
3. Survei Perilaku Anti Korupsi	3. Survei Ubinan Palawija SR3	3. Updating Pasar 2020
4. Pendataan Podes 2021	4. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Maret-April 2021	4. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2020/2021
5. Global Adult Tobacco Survei 2021	5. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Mei-Juni 2021	5. Survei E-Commerce
6. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan	6. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Juli-Agustus 2021	6. Business Character Survey
7. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel + Komplemen	7. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan September-Oktober 2021	7. Survei Profil Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya Pendidikan	8. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan November-Desember 2021	8. Survei Wisatawan Nusantara
9. Uji Coba Long Form SP2020 Tahap 2	9. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Januari-Februari 2022	9. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga
10. Long Form SP2020 (Tahapan Persiapan – Penarikan Sampel)	10. Survei Hortikultura Potensi (SHOPI2020)	10. Survei Tarif Sewa/Kontrak Rumah, Pembantu Rumah Tangga dan Baby Sitter
11. Pra Pemutakhiran Long Form SP2020	11. Survei IMK Tahunan	11. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2021
12. Ujicoba Survei Early Childhood Deveopment Index	12. Survei IMK Triwulanan	12. SVK
13. Survei Status Gizi Balita Indonesia	13. Survei Konstruksi Tahunan dan Triwulanan (SKTH dan SKTR)	13. Survei Biaya Hidup 2022 (Persiapan dan Triwulan 1)
14. Survei Status Gizi Balita Tambahan	14. Survei Pertanian Terintegrasi (AGRIS)	14. Survei K3
15. Survei Efektivitas Bantuan Sosial 2021	15. Uji coba Pembangunan Kerangka Sampel (Frame) Jagung	15. Survei Koperasi Simpan Pinjam
16. Persiapan Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia	16. Survei KSA Mandiri oleh BPS	16. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan (SKKM) BPOM
	17. Gladi Kotor ST2023	17. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)
	18. Uji Coba Pemutakhiran Muatan dan Peta dalam Rangka ST2023	
	19. Survei Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional	
	20. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021	

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan sesuai *timeline* yang ditentukan. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Secara umum di 2021 Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada:
 - banyaknya penggantian sampel blok sensus dengan alasan pembatasan akses pada wilayah BS,
 - pembatalan atau penundaan pelaksanaan lapangan beberapa survei,
 - pelaksanaan pendataan yang tidak dapat dilakukan secara *door to door*.
2. Proses penggantian sampel pada survei bidang statistik sosial mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - Penggunaan *Master Sampling Frame* (MSF) baru masih perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan perbaikan blok sensus dari kasus yang ditemukan di lapangan saat identifikasi sampel. Masih diterima laporan bahwa wilayah blok sensus perlu perbaikan akibat kesalahan pembentukan, dan baru diketahui ketika sudah terpilih sampel.
 - Masih banyak diterima pengajuan penggantian sampel blok sensus pada wilayah *remote* dengan biaya yang besar dan alokasi anggaran yang tidak mencukupi.
3. Proses penggantian sampel pada survei bidang statistik produksi mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - Usulan penggantian sampel melebihi batas waktu pengajuan yang ditetapkan sehingga sampel final untuk beberapa wilayah menjadi mundur.
 - Sebagian wilayah sampel terpilih pada kegiatan Ubinan mengalami terlewat panen karena siklus tanam padi yang lebih singkat, sehingga menyebabkan penggantian/penambahan sampel.
4. BPS mengalami serangan *ransomware* pada pertengahan triwulan pertama 2021 sehingga menimbulkan hambatan penyelesaian tugas baik dari persiapan, pelaksanaan dan finalisasi kegiatan, terutama yang terkait dengan akses data dan layanan teknologi informasi.
 - Persiapan data membutuhkan akses data dari dan ke server terhambat. Adanya *ransomware* menyebabkan seluruh layanan yang terkait jaringan, akses data dan internet tidak dapat digunakan.
 - Kegiatan pengolahan yang sedang berlangsung dihentikan sementara, beberapa di antaranya menyebabkan data yang telah diinput menjadi hilang.
5. Data keluarga hasil kegiatan SP2020 mulai pertama kali digunakan sebagai basis data pemutakhiran keluarga/rumah tangga pada survei. Masih ditemukan

ketidaktepatan dalam penyajian daftar pemutakhiran/prelis keluarga tersebut, diantaranya:

- Sebagian wilayah blok sensus yang berasal dari pecahan satuan lingkungan setempat (SLS) bermuatan besar masih menampilkan muatan 1 (satu) SLS utuh, sehingga jumlah keluarga yang harus diidentifikasi pada blok sensus menjadi sangat besar.
 - Tertukarnya cakupan muatan keluarga antar blok sensus.
6. Kegiatan pemutakhiran keluarga/rumah tangga menggunakan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) masih belum sempurna.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Mitigasi pelaksanaan survei pada kondisi pandemi Covid-19 masih diterapkan seperti pada tahun 2020 dengan penyesuaian, di antaranya:
 - Supaya tidak dijadikan alasan umum untuk penggantian sampel, pada wilayah blok sensus yang tidak dapat diakses, petugas lapangan membuat berita acara yang ditanda tangani pengurus wilayah setempat yang membuktikan bahwa ada pembatasan akses.
 - Beberapa survei membuat alternatif pendataan melalui moda *Computer-Assisted Telephone Interviewing* (CATI) dan *Computer-Assisted Web Interviewing* (CAWI) untuk mengurangi *non respons*.
2. Strategi terkait penggantian sampel:
 - Usulan penggantian sampel yang melebihi waktu yang ditentukan tetap diproses untuk memenuhi kecukupan sampel. Namun ke depannya dilakukan perbaikan kerangka sampel.
 - Melakukan pembahasan dengan tim Biro Perencanaan dan *Subject Matter* perihal pemenuhan anggaran pada kegiatan survei untuk menekan penggantian sampel.
3. Strategi terkait kendala pada layanan teknologi informasi dan komunikasi:
 - Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat SIS dan mengawal proses pemulihan layanan dan data, dengan memeriksa konten data yang berhasil dipulihkan. Berkoordinasi dengan BPS daerah untuk kelengkapan data-data yang tidak dapat dipulihkan.
 - Melakukan *convert/reformat* dan pengolahan data persiapan pemutakhiran di luar sistem.
4. Strategi terkait penyiapan data pemutakhiran:
 - Menyiapkan mitigasi pada kasus tertukar cakupan muatan antar blok sensus.

- Memperbaiki konten muatan berdasarkan laporan daerah yang sudah diverifikasi lebih lanjut.
 - Pelaksanaan pemutakhiran pada BS dengan SLS bermuatan besar pada keluarga yang bukan cakupan blok sensus kode identifikasi “tidak ditemukan” dikerjakan oleh BPS Pusat *by system*.
5. Kontribusi terhadap penyiapan CAPI mendatang:
- Mencatat seluruh laporan kendala pelaksanaan survei yang menggunakan moda CAPI
 - Secara berkala memantau perkembangan perbaikan CAPI terutama pada validasi-validasi yang ditetapkan pada survei.

3.1.3. Indikator Kinerja 3: Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

Pada tahun 2021 Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS), Direktorat PMSS telah mampu menghasilkan 4 output laporan/publikasi/aktivitas/Perban meliputi 1 (satu) buah peraturan Badan Pusat Statistik serta 3 (tiga) buah laporan (Tabel kesesuaian KBLI 2020 – 2015, Laporan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2021, Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2021), sehingga capaian kinerja sesuai dengan target semula menjadi 100% serta ditambah 1 (satu) Laporan *Statistical Business Register* (SBR). Adapun rincian capaian output tersebut adalah:

3.1.3.1. Publikasi Tabel Kesesuaian KBLI 2020 - KBLI 2015

BPS sebagai penyedia statistik berkualitas telah menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 untuk menggantikan KBLI sebelumnya yaitu KBLI 2015 Perka 2017 (selanjutnya akan disebut KBLI 2015). Untuk mendukung keterbandingan informasi berkelanjutan dalam pengawasan, analisis, dan evaluasi data secara runtun maka disusunlah buku Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2015.

KBLI 2020 disusun berdasarkan KBLI 2015 yang mengacu pada ISIC Revisi 4 tahun 2008 sampai 4 digit, disesuaikan dengan ASEAN *Common Industrial Classification* (ACIC) pada level 3 digit, dan *East Asia Manufacturing Statistics* (EAMS) pada kategori Industri Pengolahan kemudian dikembangkan lebih rinci oleh BPS sampai 5 digit untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang spesifik di Indonesia. Secara struktur KBLI 2020 terdapat beberapa perbedaan dengan KBLI 2015, kecuali pada Kategori E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Kategori T

Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kategori U Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.

Tabel kesesuaian kode lapangan usaha ini disajikan dengan cakupan korespondensi menurut struktur yang ada pada KBLI. Tabel kesesuaian dibuat mulai dari kode kategori (alfabet), kode golongan pokok (2 digit), kode golongan (3 digit), kode subgolongan (4 digit), dan kode kelompok (5 digit). Korespondensi kode lima digit merupakan kesesuaian kode kegiatan ekonomi terendah yang dinamakan kesesuaian kode kelompok kegiatan ekonomi. Kesesuaian kode empat digit merupakan agregasi (penjumlahan/penyatuan) dari kesesuaian kode lima digit, kesesuaian kode tiga digit merupakan agregasi dari kode empat digit, dan seterusnya.

Proses penyusunan publikasi Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2015 dilakukan setelah KBLI 2020 telah selesai disusun di tahun berikutnya, namun karena kebutuhan dari pengguna yang mendesak sehingga publikasi sudah diterbitkan pada awal bulan tahun 2021 yang seharusnya akhir tahun.

Tabel kesesuaian ini merupakan pedoman untuk mencari korespondensi dari suatu kegiatan usaha yang ada di KBLI 2015 ke KBLI 2020 atau sebaliknya sehingga para pengguna data dapat dengan mudah menelusuri atau mengkonversi kode dari kedua KBLI tersebut. Dengan adanya publikasi Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2015 ini diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna sebagai penunjang dalam menggunakan dan mengimplementasikan KBLI 2020.

3.1.3.2. Laporan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)

KBJI merupakan klasifikasi baku jenis jabatan yang terdapat di Indonesia, baik sektor formal maupun informal, yang didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Publikasi KBJI di tahun 2021 diupdate dari KBJI 2014 yang dengan disesuaikan jabatan yang ada atas usulan Kementerian/Lembaga. KBJI tersebut baik itu KBJI 2014 atau KBJI 2021 disusun berdasarkan *International Standard Classification of Occupation* (ISCO) 2008 oleh *International Labour Office* (ILO). Selama tahun 2019, KBJI disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPS juga yang menghasilkan draft KBJI 2019 yang dijadikan dasar penyusunan KBJI 2021.

Selama tahun 2021, kegiatan penyusunan KBJI dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian

Pariwisata dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sebagai lanjutan kerjasama selama tahun sebelumnya. Adapun manfaat penyusunan KBJI adalah:

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik terkait ketenagakerjaan.
2. Arus informasi berkelanjutan antar waktu dan wilayah.
3. Analisis profil dan kategori jabatan.
4. Referensi standar untuk kegiatan terkait data ketenagakerjaan.
5. Analisis kompetensi tenaga kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pendidikan dan keterampilan, pengupahan, dan lain-lain.

Seiring waktu berjalan, masih ada kendala proses penyusunan KBJI, yaitu diperlukan waktu yang lebih agar mendapatnya nama jabatan yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga. KBJI digunakan sebagai analisis jabatan sehingga diperoleh nama-nama jabatan terstandar secara nasional dan dapat dilihat kompetensi setiap jabatan.

3.1.3.3. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2021

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2021 merupakan kumpulan dokumentasi laporan konsultasi klasifikasi statistik. Laporan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan laporan konsultasi klasifikasi statistik yang dilakukan pada Fungsi PSKS dalam rangka dokumentasi laporan untuk pengembangan klasifikasi di masa yang akan datang. Bentuk media konsultasi dapat melalui:

1. Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK), sebelumnya Sistem Pencarian Klasifikasi (SPK) Online;
2. Telepon ke Fungsi PSKS;
3. Kunjungan ke Fungsi PSKS; dan
4. Media lainnya, seperti *Email*, *WhatsApp* (WA), surat dan lainnya.

Kegiatan konsultasi klasifikasi statistik menggambarkan kebutuhan kode klasifikasi statistik dari pengguna. Pengguna menggunakan media yang telah disediakan untuk mengkonfirmasi kode yang tepat atau bertanya mengenai kode klasifikasi yang menjadi kebutuhannya. Pengguna media konsultasi yang menanyakan kode klasifikasi statistik ke Fungsi PSKS selama tahun 2021 sudah melayani 100 persen pengguna, baik melalui SILASTIK, telepon, kunjungan ke Fungsi PSKS maupun melalui media lain seperti *email*, WA atau surat.

Pada tahun 2021 media aplikasi yang terbaru yaitu Sistem Pembakuan (SIBAKU) yang konsultasinya sudah di-*inline*-kan dengan SILASTIK, sehingga lebih memudahkan pelayanan memberikan konsultasi. Persoalan yang masih menjadi kendala di tahun 2021

adalah kelanjutan masa pandemik Covid-19, yang mengakibatkan media lain seperti telepon dan kunjungan yang menurun. Hal ini yang menjadikan penurunan jumlah dokumen laporan konsultasi statistik. Konsultasi melalui kunjungan langsung mengharuskan petugas dan pengguna melakukan konsultasi secara *offline*, namun pada masa pandemik dilakukan pembatasan sehingga layanan *offline* menjadi kurang optimal karena adanya petugas yang *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO).

3.1.3.4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Dalam Peraturan Presiden tersebut BPS sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik mempunyai tugas sebagai pembina data statistik yang salah satunya adalah menetapkan Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau Instansi Daerah. Terkait hal tersebut, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data sebagai langkah awal dalam menyediakan standar statistik untuk Satu Data Indonesia.

Pada tahun 2021, disusun Standar Data Statistik Nasional (SDSN) yang merupakan basis data yang berisi kumpulan Standar Data lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. SDSN tahun 2021 merupakan pemutakhiran dari MFSDS (Master File Data Statistik) yang di susun di tahun sebelumnya. Usulan SDSN 2021 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SDSN berisi 3910 standar data yang terdiri dari 1461 MFSDS 2020 dan sisanya adalah usulan yang masuk di tahun 2021. Tahapan penyusunan SDSN 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Januari – Februari : Penerimaan usulan standar data statistik dari SM BPS dan K/L target, *cleaning* dan reviu usulan yang telah masuk
- b. Maret – April : Reviu usulan SDS oleh Tim PSKS, Konfirmasi usulan bersama SM BPS dan K/L target
- c. Mei – Juni : Konfirmasi usulan bersama SM BPS dan K/L target, Penyusunan Draf Peraturan BPS tentang SDSN 2021
- d. Juli – Agustus : Penyiapan Harmonisasi dan Uji Publik

- e. September – Desember : Penerbitan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan SDSN tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Proses konfirmasi usulan bersama SM BPS dan K/L yang dilakukan secara virtual melalui *ZoomMeeting* terkesan sangat memakan waktu dikarenakan beberapa hal seperti peserta diskusi mengikuti lebih dari satu rapat virtual, komunikasi kurang lancar baik karena kendala teknis maupun peserta yang sudah lelah setelah rapat virtual selama lebih dari 4 jam.
- b. Keputusan final, khususnya pada usulan Standar Data Statistik (SDS) yang beririsan dan usulan SDS pada isu-isu strategis, memerlukan proses yang lama sehingga terkesan tidak efektif. Hal ini dikarenakan peserta diskusi yang hadir tidak begitu paham terkait topik bahasan dan/atau bukan merupakan pengambil keputusan.
- c. Kesadaran KL untuk turut serta dalam perwujudan Standar Data masih rendah. KL cenderung masih mengutamakan satu data sektoralnya, akan tetapi belum menganggap standar data, yang notabenenya prinsip dasar Satu Data Indonesia, sebagai suatu hal yang *urgent* dan penting.
- d. Proses penandatanganan Draf Peraturan Badan Pusat Statistik tentang SDSN ternyata memerlukan waktu lebih dari 3 bulan, sehingga Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional baru dapat dibagipakaikan di akhir Desember. Hal ini menyebabkan jadwal *launching*/sosialisasi terkait perban tersebut terpaksa diundur hingga awal Tahun 2022.

Strategi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan diskusi bersama tim PSKS dengan menyusun poin-poin bahasan yang perlu keputusan bersama baik dengan *subject matter* (SM) BPS maupun K/L.
- b. Menyertakan referensi/pustaka terkait topik yang akan dibahas, serta mengirimkan LK yang harus diriviu/disepakati dengan tenggat waktu tertentu.
- c. Secara bertahap dilakukan sosialisasi dan diskusi bersama K/L dalam berbagai kesempatan, utamanya terkait standar data serta peran strategis standar data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

- d. Proses internalisasi kepada SM BPS tentang Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan proses sosialisasi kepada K/L dan BPS Selindo dilakukan pada tanggal 17 Januari 2021.

3.1.3.5. Laporan *Statistical Business Register* (SBR) 2021

Pada tahun 2013, BPS mulai membangun SBR dengan nama *Integrated Business Register* (IBR) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh *subject matter* secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR ditetapkan sebagai salah satu prinsip dasar transformasi statistik dan peningkatan kualitas melalui program STATCAP-CERDAS dan Reformasi Birokrasi BPS. SBR dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku mengikuti *System of National Account (SNA) 2008*. SBR merupakan basis data unit ekonomi yang terintegrasi, mutakhir, dan komprehensif yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka induk untuk survei-survei ekonomi, sehingga SBR dapat dijadikan sebagai alat koordinasi cakupan sensus/survei dan integrasi data. Pemeliharaan data SBR dilakukan melalui *survey feedback*, *quality improvement survey*, *profiling*, dan sumber data administratif.

Bertransisi dari sistem pemutakhiran direktori perusahaan/usaha yang masih dikelola oleh masing-masing *subject matter* produsen data, proses pemutakhiran data SBR belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan SBR pada tahun 2021 berfokus kepada penyiapan statistik ekonomi terintegrasi, di samping pemeliharaan data dan pelayanan kebutuhan kerangka induk survei berbasis perusahaan/usaha.

Pertama, SBR membangun diskusi kolaboratif dengan Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menginisiasi kerjasama perolehan data administratif. Dengan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-76/SJ/2019 dan 29.02.18/KS.P/30-X/2019 terkait pertukaran data BPS dan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya data wajib pajak/data Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meng-*update* SBR.

Pada tahun 2021, SBR telah melakukan kerjasama dengan LKPP bersamaan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 5 dan 07.13.19/KS.P/05-IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang pemanfaatan KBLI dan perolehan data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah untuk SBR. Selain itu, juga telah ditandatangani Perpanjangan

MoU antara BPS dan BKPM Nomor: 19/P/A.1/2021 dan 10/KS.M/06-IX/2021 tanggal 6 September 2021 dan proses drafting PKS antara BPS dan BKPM untuk perolehan data registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada *Online Single Submission* (OSS) dan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk pemutakhiran SBR.

Kedua, SBR melakukan kegiatan Penyusunan Draf Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi melibatkan tim terintegrasi lintas unit kerja dari kedeputian MIS, *subject matter*, dan neraca. Penyusunan petunjuk teknis ini penting untuk mendefinisikan proses bisnis baru yang terintegrasi dan memastikan aliran data dari sumber data hasil survei internal BPS dan data administratif Kementerian/Lembaga untuk pemutakhiran SBR berjalan dengan baik. Dengan demikian, SBR dapat menyediakan kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha yang komprehensif dan *up-to-date* sesuai harapan pengguna. Output dari kegiatan ini adalah draft petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Kepala BPS.

Ketiga, SBR melakukan pengembangan sistem secara mandiri/*inhouse* sebagai salah satu modul dari *Frame Register System* (FRS)/SBR Milestone 1 melanjutkan pengembangan sistem oleh pihak ketiga (sistem lelang) pada tahun 2019. Sistem SBR merupakan sistem yang memfasilitasi pengelolaan data bisnis dan mendukung penyediaan kerangka bisnis yang termutakhirkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus dan Survei di BPS (lebih detailnya lihat pada bagian Sistem Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan oleh Direktorat PMSS).

Keempat, SBR melakukan pengintegrasian/pemutakhiran basis data hasil kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak yaitu *cleaning* data pajak dan Statistik Pariwisata. SBR telah menerima data pajak yang dikirimkan oleh Kementerian Keuangan. Akan tetapi, beberapa hal pada data tersebut masih belum sesuai dengan standar data yang digunakan oleh SBR. Salah satu data yang belum sesuai tersebut adalah variabel wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Variabel wilayah tersebut masih berupa nama wilayahnya, sedangkan variabel wilayah yang digunakan oleh SBR adalah berbentuk kode wilayah yang mengacu pada Master File Desa (MFD). Penggunaan MFD tersebut adalah untuk memudahkan pengelolaan data seperti konsistensi isian, melakukan tabulasi, *matching*. Oleh karena itu, perlu melakukan kodefikasi wilayah data pajak ke MFD. Adapun alur yang digunakan adalah dengan melakukan *matching* data nama wilayah dengan nama wilayah yang ada pada MFD untuk diambil kodenya. Hasil dari proses tersebut ada record yang *matched* nama wilayahnya sampai desa, ada yang hanya sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ada yang tidak *matched* sama sekali (proses 1).

Setelah proses itu dilakukan, dilakukan proses secara manual untuk memperbaiki kesalahan yang menyebabkan tidak *matched* (proses 2). Proses tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap data pajak yang sejumlah 64.916.352 *record*. Sedangkan pengintegrasian/pemutakhiran basis data survei pariwisata adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh Fungsi Statistik Pariwisata. Sejak tahun 2019, SBR telah menerima data *feedback* dari Statistik Pariwisata yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran data SBR. Pada tahun 2021, ada 11.298 usaha yang dapat dimutakhirkan dari kegiatan Statistik Pariwisata.

Kelima, SBR telah melakukan supervisi *updating* data SBR di tahun 2021 mengenai verifikasi data perusahaan ke beberapa kabupaten/kota. Supervisi *updating* data dengan cara Konfirmasi Hasil Pemutakhiran (KHP) Data SBR yang dilakukan oleh petugas dengan melakukan wawancara ke Fungsi Statistik Produksi dan Distribusi terkait direktori usaha kabupaten/kota yang menjadi tempat supervisi di atas. Untuk memudahkan proses konfirmasi, maka petugas dibekali instrumen *file excel* data perusahaan yang perlu dikonfirmasi. Di instrumen itu, petugas mengkonfirmasi isian variabel yang belum lengkap ataupun masih kosong (belum terisi) meliputi nama usaha/perusahaan, alamat, kode wilayah (kecamatan dan desa), nomor telepon, email, KBLI, status keberadaan, dan aktivitas/ lapangan usaha. Dari KHP tersebut akan diperoleh hasil direktori usaha ditemukan atau tidak ditemukan di kabupaten/kota tersebut.

Keenam, SBR memberikan pelayanan permintaan data dari beberapa unit kerja internal untuk keperluan penyiapan kerangka survei di antaranya pada kegiatan survei pariwisata, survei dampak Covid-19, *Pilot Economy Wide Survey*, survei tahunan *captive power*. Di samping keenam kegiatan tersebut, SBR berpartisipasi aktif mengikuti forum internasional untuk dapat mengikuti perkembangan metode dan teknologi dari berbagai negara untuk mengoptimalkan proses bisnis SBR. Beberapa kegiatan/forum internasional yang diikuti pada tahun 2021 antara lain: keikutsertaan tim SBR dalam Tim *Task Force* Globalisasi dan Digitalisasi dalam Komite Ahli PBB terkait Statistik Usaha dan Perdagangan/*United Nations Committee of Experts on Business and Trade Statistics* (UNCEBTS); partisipasi dalam pilot survei dan pertemuan UNCEBTS; partisipasi dalam pertemuan Wiesbaden Group; diskusi progress dan tantangan SBR dalam *technical assistance Australian Bureau of Statistics* (ABS) di bawah payung Program Kerja Sama BPS dan ABS; kontribusi dalam memberikan tanggapan terkait dokumen agenda sidang pada *52nd Session of the United Nations Statistical Commission* (UNSC) 1-5 Maret 2021 oleh *United Nations Statistical Division* (UNSD) yaitu dokumen 3(e) *Business and Trade Statistics*;

partisipasi penulisan satu bab buku dengan penerbit Wiley berjudul *Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection* berkolaborasi dengan ABS.

Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan SBR pada tahun 2021 ini dirangkum dalam laporan *Statistical Business Register 2021*.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan SBR:

1. Sumber Daya Manusia

- Terbatasnya SDM teknologi informasi yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis *website/aplikasi* guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas petunjuk teknis standar data, klasifikasi statistik, dan SBR agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem (*developer*) Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/pemeliharaan standar data, klasifikasi statistik, dan SBR. Hal ini ke depan dapat menjadi kendala karena volume pekerjaan yang terus meningkat dengan ditetapkannya Peraturan Badan terkait KBLI dan standar data statistik serta integrasi data SBR yang melibatkan lintas unit kerja dan lintas K/L. Permintaan bantuan pengembangan dari fungsi Direktorat SIS yang diperoleh terbatas, tidak ada tim yang khusus berfokus hanya melayani satu fungsi klasifikasi, standar data, dan SBR dimana belum mendapatkan prioritas utama dalam penyelesaiannya dibandingkan pengembangan sistem fungsi/subdirektorat lain.

2. Koordinasi dan Sosialisasi

- Belum berjalannya koordinasi di internal BPS sendiri maupun BPS dengan K/L dalam hal Standar Data Statistik dan SBR.
- Kurangnya pemahaman baik internal BPS sendiri maupun di Kementerian/Lembaga dalam penerapan petunjuk teknis standar data statistik.
- Terbatasnya sisi anggaran dalam melakukan sosialisasi produk/output seperti standar data statistik dan KBLI.

3. Volume/ beban pekerjaan

- Tindak lanjut implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik terkait Standar Data Statistik dan KBLI 2020 memerlukan pembinaan/ layanan yang semakin meluas dan meningkat kepada internal/eksternal BPS dalam kaitannya dengan Satu Data Indonesia.
- Meningkatnya sumber data untuk mengupdate SBR baik internal maupun eksternal untuk diintegrasikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.

- Meningkatnya permintaan data SBR untuk kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha secara berkelanjutan.
 - Kebutuhan pengembangan dan penyusunan metodologi integrasi data SBR, standar data, klasifikasi statistik dan penyusunan output yang belum memiliki proses bisnis yang efisien dan sarana yang memadai untuk dapat memberikan output yang berkualitas dan mendukung berbagai kebutuhan berbagai pengguna termasuk kebutuhan data baru terkait isu-isu dampak fenomena statistik terkait pandemi, digitalisasi, globalisasi, dan *sustainability*.
4. Konten dan *Support Data*
- *Updating* SBR dengan metode *survey feedback* masih belum terintegrasi dan belum mencakup seluruh *subject matter* sehingga updating hanya dilakukan pada sebagian data SBR.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan SBR:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi KBLI sebagai salah satu instrumen Satu Data Indonesia.
2. Penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik di BPS Daerah belum secara formal ditentukan, mengupayakan berkoordinasi dengan Koordinator Fungsi IPDS Seluruh Indonesia untuk sementara merupakan tugas Subkoordinator Fungsi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Daerah.
3. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk dapat membentuk unit kerja khusus untuk menangani SBR, dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya Fungsi Pengembangan Register Usaha pada bulan Agustus 2021.
4. Meningkatkan koordinasi antara SBR dan *subject matter*, untuk menyepakati pembangunan tatakelola transfer data hasil survei.
5. Berkoordinasi dengan *subject matter* untuk mengisi variabel SBR yang belum terisi.
6. Berkoordinasi dengan tim Neraca Nasional untuk upaya peningkatan pemahaman SNA melalui *Focus Group Discussion (FGD)* ataupun *capacity building*.
7. Dalam masa transisi updating SBR dilakukan secara bertahap dengan *subject matter* tertentu sebagai *prototype* yang akan dikembangkan kepada *subject matter* lainnya dengan membangun petunjuk teknis pemutakhiran *survey feedback* dan data administratif pada tahun 2021.
8. Menindaklanjuti MoU Pertukaran Data BPS dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan data wajib pajak sebagai bahan untuk memperbarui data BPS secara terus menerus dan inisiasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya, dalam

hal ini terkait dengan SBR seperti yang sudah dilakukan di tahun 2021 yaitu kerjasama dengan LKPP dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.1.4. Indikator Kinerja 4: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dibutuhkan master dan peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang *up to date* dan berkualitas. Untuk memperoleh tujuan tersebut, setiap tahun Direktorat PMSS melakukan pemutakhiran master dan peta wilayah kerja statistik dengan memanfaatkan teknologi mulai dari proses *updating* wilkerstat sampai dengan pengiriman hasil peta yang dimutakhirkan. Capaian indikator dalam bentuk persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Turunan IKU	Penanggung Jawab	Capaian Indikator Turunan	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel	Persentase master wilkerstat yang diupdate terhadap pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	100 %
	Persentase peta wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Persentase peta yang diupdate terhadap master wilkerstat yang diupdate = 100 %	

3.1.4.1. Pemutakhiran Master Wilayah Kerja Statistik

a. Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS)

Pemutakhiran master wilkerstat meliputi pemutakhiran pada wilayah administrasi dan blok sensus, yang dilakukan melalui sistem MFD dan MBS berbasis *web* (MFDOnline) oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemutakhiran ini dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun dan menghasilkan 2 (dua) kali master *up to date* dalam setiap tahunnya, yaitu master periode Januari-Juni (Semester 1) dan Juli-Desember (Semester 2). Menjelang akhir

periode pemutakhiran, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan Berita Acara Perubahan Wilayah beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel melalui MFDOnline.

Mulai semester 2 tahun 2021 selain mengelola MFD dan MBS (blok sensus 2010), master BS2020 dan master SLS mulai dikelola melalui MFDOnline. BS2010 masih dikelola untuk kebutuhan survei bidang statistik produksi dan distribusi/jasa, sedangkan survei bidang statistik sosial telah memanfaatkan BS2020. Master SLS dikelola untuk pengembangan metodologi statistik ke depan.

Dari laporan perubahan wilayah yang disampaikan BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota, pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan wilayah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan wilayah administrasi masih terjadi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Perubahan pada BS2010 difokuskan pada perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pada tingkat desa-nya, seperti adanya penggabungan/pemekaran desa. Perubahan BS2020 dan SLS yang dilakukan di semester 2 difokuskan pada penyesuaian-penyesuaian identitas akibat perubahan wilayah administrasi yang terjadi pada periode 2020 – 2021 dimana saat itu belum tersedia fasilitas pemutakhirannya melalui aplikasi MFDOnline.

Adapun capaian kegiatan pemutakhiran master wilkerstat pada 2021 ini adalah 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan laporan daerah yang diterima, dimana seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi mengirimkan Berita Acara pemutakhiran, meskipun ada yang mengirimkannya melebihi waktu yang ditentukan. Keterlambatan pelaporan salah satunya disebabkan oleh pembukaan kembali pelaksanaan pemutakhiran periode 2021 semester 1 mundur karena sistem belum dapat dipulihkan setelah serangan *ransomware*. Pada semester 1, secara total hanya diberi waktu kurang dari 2 (dua) bulan untuk pelaksanaan pemutakhiran MFDOnline. Di semester 2, entri pemutakhiran dimulai bulan Oktober 2021 dengan mengimplementasikan New MFDOnline. Walaupun pada pelaksanaan pemutakhiran master wilkerstat 2021 ini mengalami banyak kendala, namun tetap dapat dilaksanakan sesuai target dan cakupan yang ditetapkan.

Berikut adalah Master Wilkerstat Tahun 2021 yang dimutakhirkan melalui MFDONLINE:

Tabel 3.4. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2021

Master Wilkerstat	Jumlah Master Wilkerstat	
	2021 Semester 1	2021 Semester 2
Provinsi	34	34
Kabupaten/Kota	514	514
Kecamatan	7.274	7.277
Desa/Kelurahan	83.843	83.850
Blok Sensus (2010)	845.663	845.665
Blok Sensus (2020)	853.906	853.912
SLS	1.335.303	1.335.305

b. Kajian Prosedur Pemutakhiran Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Tahun 2019, BPS telah melakukan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat berbasis SLS terkecil. Hasil kegiatan ini adalah master SLS beserta informasi muatannya. Hasil tersebut kemudian dimanfaatkan menjadi dasar dalam persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu dalam penyiapan basis data awal dengan berkolaborasi dengan data administrasi kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data penduduk tersebut dimasukkan ke dalam master SLS BPS dan dijadikan basis data awal untuk kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Tahun 2020 pada pelaksanaan SP2020 dilakukan verifikasi penduduk berdasarkan data persiapan di atas, berbasis SLS terkecil, menghasilkan data penduduk yang telah dimutakhirkan sesuai status *de jure* dan status domisili. Hasil tersebut digunakan BPS untuk membangun master kerangka sampel (*master frame*). Kerangka sampel merupakan salah satu infrastruktur statistik yang sangat penting dalam menunjang kualitas tiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari penentuan desain survei sampai analisis hasilnya.

Amanah Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia mensyaratkan adanya standar data, standar metadata dan kode referensi. Untuk itu diperlukan *enumeration area* yang umum dikenal dan digunakan oleh berbagai pihak, dengan tetap berpedoman pada kaidah pembentukan kerangka sampel. Keberhasilan pelaksanaan SP2020 yang berbasis data administrasi dalam tingkat SLS menimbulkan tantangan selanjutnya, yaitu

pemanfaatan SLS sebagai *enumeration area* dimana keberadaannya di lapangan lebih dikenal dan ada pengurus yang bertanggung jawab sampai dengan tingkat terkecil. Sebagai *enumeration area*, SLS harus memenuhi syarat *up to date*, sehingga perubahan yang terjadi di lapangan harus dapat ditangkap. Untuk itu diperlukan kajian pemanfaatan SLS sebagai *enumeration area* beserta prosedur pemutakhirannya.

Capaian dalam rangka menyusun prosedur pemutakhiran SLS di antaranya telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tujuannya adalah memperoleh informasi bagaimana masing-masing kementerian melakukan pengelolaan wilayah administrasi dan satuan wilayah di bawah desa. Selain itu BPS juga melakukan penjajakan kemungkinan “pengelolaan bersama” satuan di bawah desa tersebut dengan kementerian terkait ini, dengan mengusung amanah Satu Data Indonesia.
- b. Koordinasi internal BPS Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, dalam hal ini spesifik dengan Fungsi Statistik Ketahanan Wilayah yang selama ini menangani kegiatan Pendataan Potensi Desa (PODES), serta Tim Transformasi Statistik terkait pembinaan Desa Cantik. Tujuan koordinasi ini adalah untuk melihat peluang integrasi kegiatan pemutakhiran SLS dalam kegiatan rutin yang telah dilaksanakan di BPS.
- c. Koordinasi Biro Perencanaan BPS bertujuan membuat kajian perencanaan anggaran pada beberapa alternatif prosedur pelaksanaan pemutakhiran SLS.
- d. Ujicoba pemutakhiran muatan dan peta wilkerstat merupakan kegiatan menguji cobakan prosedur pemutakhiran master dan peta SLS ketika terjadi perubahan SLS di lapangan.
- e. Menyusun laporan prosedur pemutakhiran SLS yang kemudian disampaikan kepada pimpinan BPS.

Secara umum tahapan pemutakhiran SLS yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Skenario-1
 - Informasi perubahan SLS diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Podes yang dilakukan setiap tahun.
 - Informasi perubahan SLS kemudian ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi lapangan, kelengkapan informasi perubahan SLS dalam daftar

yang disediakan, penggambaran batas SLS, dan dilanjutkan tahapan perekaman data perubahan dan pengolahan/digitasi peta.

- Kelebihan mekanisme ini adalah pada efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan pemutakhiran. Sedangkan kekurangannya adalah inisiasi kegiatan pemutakhirannya bergantung pada pelaksanaan kegiatan Podes yang mengumpulkan informasi awal keberadaan perubahan SLS. Selain itu informasi yang diperoleh dari desa ada kemungkinan berbeda dengan kondisi SLS.

b. Skenario-2

- Pelaksanaan pemutakhiran SLS dilaksanakan dalam satu kegiatan tersendiri secara utuh, terintegrasi dengan pelaksanaan pemutakhiran master wilkerstat. Kegiatan ini menuntut petugas pemutakhiran mengunjungi seluruh desa atau SLS untuk memperoleh informasi perubahan SLS.
- Keuntungannya adalah kegiatan ini memiliki jadwal pelaksanaan tersendiri, tanpa tergantung pada pelaksanaan dan hasil kegiatan lainnya. Namun efisiensi biaya dan waktu menjadi hal yang dikesampingkan.

Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait yang memerlukan atau memanfaatkan data perubahan SLS;
- Pemanfaatan SLS sebagai *enumeration area* perlu memperhitungkan perubahan desain survei yang dilaksanakan BPS, untuk melihat dampaknya terhadap kualitas estimasi dari indikator yang dihasilkan;
- Perlunya rancangan perencanaan survei yang fleksibel dengan adanya perubahan SLS yang cukup dinamis serta muatan yang beragam antar SLS satu dengan lainnya;
- Melakukan ujicoba semua skenario pemutakhiran SLS yang diajukan sehingga mendapatkan kesimpulan yang komprehensif untuk mendukung keputusan ke depan.

Masalah/kendala yang dihadapi dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kendala terkait pengelolaan dan pemutakhiran master wilkerstat

- Keterlambatan pengolahan hasil semester 1 tahun 2021 adalah akibat *ransomware* serta menunggu proses pemulihan layanan teknologi informasi BPS untuk dapat mengakses kembali *database* dan aplikasi yang digunakan;
- Proses pelaporan daerah dan pengecekan laporan pada awal implementasi lebih lama, dan beberapa pelaporan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

yang ditentukan, karena semua pengguna sedang mempelajari sistem baru yang diterapkan;

- Terjadi perubahan pengguna di tingkat daerah dimana di daerah belum tersedia fasilitas pengelolaan pengguna, sehingga perubahan ini harus dilaporkan dan diubah di pusat sehingga memakan waktu yang lebih panjang.
- MFDOnline pada menjelang akhir pelaporan menjadi sulit diakses, perlu dilakukan pengecekan kembali penyebabnya.

2. Kendala terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS

- Belum ada tata kelola yang lengkap dalam pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan oleh desa, termasuk metadata dan standar datanya. Selain itu jadwal pengumpulan data juga belum ditetapkan dengan jelas.
- Pembentukan RT/RW menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah sehingga detail pengelolaannya tidak dapat didapatkan secara lengkap dengan koordinasi pada tingkat kementerian.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Terhadap kendala akses MFDOnline strategi yang dilakukan adalah:

- Menerapkan mitigasi pengiriman laporan perubahan wilayah melalui *email*. Admin pusat melakukan pemeriksaan laporan tersebut dan memperbaikinya pada MFDOnline;
- Merancang perbaikan pada aplikasi MFDOnline untuk dikerjakan pada periode selanjutnya;

2. Strategi terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS antara lain:

- Melakukan inisiasi pembahasan pembinaan sektoral yang berkelanjutan, mulai dari penentuan standar dan metadata sampai dengan tata kelola pemutakhiran SLS;
- Melakukan diskusi intensif antara BPS dengan Kemendagri dan Kemendesa PDTT, dalam menentukan penanggung jawab pemutakhiran variabel-variabel pada pencacahan yang berbasis desa;

3.1.4.2. Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

a. Jumlah peta wilayah kerja statistik Tahun 2021 (desa/kelurahan) yang mutakhir

Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat dilakukan setiap tahun. Informasi lapangan mengenai perubahan wilkerstat didapat dari kegiatan yang sensus/survei yang sedang berjalan. Hasil perubahan wilkerstat dilaporkan melalui MFDOnline. Sejalan dengan itu,

pemutakhiran wilkerstat harus diikuti pemutakhiran peta digitalnya. Hasil pemutakhiran diupload ke *Geospatial System* yang merupakan sarana untuk mengatur/manajemen peta digital (upload, download, dan pengecekan peta).

Pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan Digitalisasi Titik Bangunan Hasil SP2020. Pada kegiatan ini titik-titik bangunan yang tergambar pada peta saat SP2020 diubah ke dalam bentuk digital. Selain itu dilakukan juga pemutakhiran peta wilkerstat jika ditemukan perubahan batas pada peta maupun berdasarkan informasi dari lapangan. Pemutakhiran peta digital batas wilkerstat SLS dan BS bisa jadi mengakibatkan perubahan pada batas desa, sehingga peta desa pun harus dimutakhirkan walaupun tidak ada pemekaran/penggabungan desa.

Jumlah wilkerstat yang mutakhir pada tahun 2020 semester 1 tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia adalah sebanyak 83.831 desa/kelurahan. Kemudian tahun 2021 semester 1 dari hasil pelaporan MFD Online, jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia adalah 83.843.

Dalam jangka waktu setahun ini, terdapat 26 desa/kelurahan yang mengalami pemekaran/penggabungan. Namun secara peta digital, terdapat lebih dari 200 desa/kelurahan yang mengalami pemutahiran batas. Hal ini disebabkan adanya perubahan/pemutakhiran batas SLS yang dilakukan pada tahun 2021. Jumlah pemutakhiran peta digital desa/kelurahan dapat diketahui dari *Geospatial System*. Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Perubahan informasi desa dan SLS/non SLS yang begitu cepat sering kali tidak dapat secara otomatis diupdate.
2. Belum terintegrasinya sistem MFDOnline dengan *Geospatial System*, sehingga perubahan nama dan/atau kode wilkerstat tidak otomatis berubah pada atribut peta digital, demikian pula dengan perubahan batasnya.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Segala perubahan dicatat oleh kabupaten/kota dan secara bertahap pemutakhiran dilaporkan dalam periode yang telah ditentukan.
2. Pemutakhiran master wilayah dengan pemutakhiran petanya masih dilakukan secara manual. Diharapkan ke depannya, saat peta desa diupdate secara spasial dan tabularnya, maka pada sistem master wilayahnya juga ikut ter-update, sehingga integrasi antar sistem sangat diperlukan.

b. Jumlah peta blok sensus yang terintegrasi dengan titik bangunan hasil SP2020

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan digitalisasi titik bangunan hasil SP2020. Hasil digitalisasi titik bangunan selanjutnya diintegrasikan dengan peta blok sensus untuk keperluan identifikasi keluarga atau rumah tangga dalam pre-list pada setiap blok sensus kegiatan sensus atau survei ke depan. Dengan adanya master peta wilayah beserta muatan titik bangunan sebagai dasar, maka untuk ke depannya, muatan dapat di-update berikut dengan lokasi titik bangunan setiap rumah tangga atau keluarga.

Pelaksanaan kegiatan digitalisasi titik bangunan diawali dengan adanya pelatihan yang dilengkapi dengan buku pedoman. Hal terpenting dalam kegiatan teknis ini adalah petugas bisa melakukan georeferens titik bangunan, melakukan digitasi, dan melengkapi atribut peta digital. Pelatihan dilakukan secara berjenjang, online untuk instruktur, dan offline untuk petugas. Dalam kegiatan ini, outputnya adalah peta digital titik bangunan yang sudah teridentifikasi dalam blok sensus. *Output* peta kemudian dikirimkan melalui GS.

Bersamaan dengan penyusunan digitalisasi titik bangunan, peta BS2020 juga dimutakhirkan pada tahun 2021. Jumlah peta blok sensus yang terintegrasi dengan titik bangunan hasil SP2020 dan dimutakhirkan mencapai 550.000 peta blok sensus. Sementara itu, hasil digitalisasi titik bangunan yang dikirimkan melalui *Geospatial System* diperoleh sebanyak 10.314.433 titik bangunan pada peta yang sudah didigitalisasi yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran peta blok sensus dan digitalisasi titik bangunan, terdapat beberapa masalah dan kendala. Namun demikian, berbagai mitigasi dan solusi sudah diupayakan. Berikut diuraikan masalah/kendala dan solusi yang telah dilakukan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. SDM di kabupaten/kota non organik kurang menguasai *software* sistem informasi geografis sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat aplikatif.
2. Dalam pelaksanaannya, peta titik bangunan di beberapa wilayah tidak lengkap dikarenakan kurangnya pemahaman petugas tentang penggambaran pada peta, peta tidak terdokumentasikan dengan baik, dan faktor lain. Hal ini menyebabkan hasil digitalisasi di beberapa wilayah menjadi kosong.
3. Masih adanya kesalahan pembentukan blok sensus dan masalah BS kantong.

4. Adanya penamaan atau pengisian atribut yang tidak standar yang mengakibatkan adanya *error* saat hasil digitalisasi di-*upload* ke *Geospatial System*.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Untuk masalah SDM, dilakukan *briefing* kepada petugas mengenai tahapan penggunaan *software* QGIS. Materi praktek dan contoh studi kasus juga diperbanyak.
2. Kegiatan digitalisasi titik bangunan disesuaikan dengan peta yang ada saja.
3. Pemutakhiran peta BS disesuaikan dengan master BS yang sudah ditetapkan, dapat diperbaiki tanpa mengubah master.
4. Penamaan atau pengisian atribut perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dan setelah itu di-*upload* kembali ke *Geospatial System*.

c. Peraturan Badan Pusat Statistik tentang kode dan nama wilayah kerja statistik

Di tahun 2021, Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik diterbitkan dalam bentuk publikasi pada *web* BPS, yaitu Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi tahun 2020 semester 1. Untuk kondisi tahun 2020 semester 2 dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 541 Tahun 2021 yang tidak dipublikasikan. Sementara itu, untuk Peraturan BPS kondisi tahun 2021 semester 1 sudah selesai disusun, namun masih menunggu pengesahannya dari Kemenkum HAM.

Laporan peta desa yang mutakhir kondisi 2020 semester 1 dituangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Dalam Peraturan tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2020 Semester 1 adalah sejumlah 83.831 desa yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Sementara itu, berdasarkan Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi 2021 semester 1 yang masih dalam proses pengesahan, jumlah desa mutakhir yang dilaporkan berjumlah 83.843 desa/kelurahan. Masalah dan kendala yang dihadapi dan strategi mengatasinya dijelaskan sebagai berikut.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Proses pengesahan Peraturan memerlukan waktu yang lama.
2. Kapasitas file yang besar menyebabkan dokumen Peraturan dapat di-*upload* ke dalam sistem namun tidak bisa diakses oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

Strategi untuk mengatasi kendala adalah:

1. Menunggu proses yang dilakukan Biro Humas dan Hukum sesuai prosedur yang telah ditentukan.
2. Pengiriman file dokumen dilakukan juga melalui email.

d. Penyiapan kerangka geospasial ST2023

Dalam mempersiapkan kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei melakukan pemutakhiran dan penyusunan kerangka induk geospasial lahan pertanian sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan ST2023. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun dalam *Road Map* ST2023, penyusunan kerangka geospasial dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022.

Pada tahun 2021, kegiatan yang dilakukan adalah Studi Penyusunan Kerangka Geospasial ST2023 dan Uji Coba Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023. Kegiatan Studi Penyusunan Kerangka Geospasial ST2023 bertujuan untuk mencari metode penyusunan Kerangka Geospasial ST2023 dan mendapatkan prediksi wilayah potensi pertanian. Sementara itu kegiatan Uji Coba Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 bertujuan menguji metode dan instrumen untuk kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 yang akan dilakukan tahun 2022 dan melakukan *ground check* dari tutupan lahan di wilayah sampel terpilih berdasarkan peta prediksi tutupan lahan.

Dalam penyusunan kerangka geospasial lahan pertanian digunakan teknologi penginderaan jauh yang direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memproduksi statistik pertanian yang lebih efektif. Proses penyusunan kerangka geospasial ini dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa grid *ecoregion*, dimana *training* sampel diambil dalam beberapa grid yang memiliki variasi tutupan lahan. Interpretasi visual citra satelit dilakukan untuk mendapatkan poligon sampel lahan pertanian yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi dalam memprediksi potensi lahan pertanian. Pengolahan dilakukan dengan metode *machine learning* hingga menghasilkan tingkat akurasi dan pembentukan klasifikasi tutupan lahan. Hasil yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah peta prediksi potensi klasifikasi lahan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kerangka geospasial adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman personal dalam melakukan interpretasi tutupan lahan pada citra berbeda-beda.
2. Dalam proses pengolahan, arsitektur sistem kurang optimal sementara jumlah grid yang akan diproses sangat banyak.
3. Peta prediksi potensi lahan pertanian hasil klasifikasi yang diperoleh kurang *smooth* jika dilakukan dalam *ecoregion*.

Solusi atau strategi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan persepsi interpretasi visual citra antar personal disamakan dengan contoh berbagai jenis tutupan lahan. Selain itu, dilakukan *ground check* beberapa sampel lahan pertanian untuk menguji *training* sampel yang dibuat.
2. Pengerjaan proses *running* model dan klasifikasi dilakukan secara bergantian dan terjadwal. Selain itu, arsitektur sistem lebih ditingkatkan sehingga pengolahan data bisa berhasil dilakukan.
3. Output peta prediksi potensi lahan pertanian tidak ditampilkan per wilayah *ecoregion* tetapi per wilayah pulau.

3.1.5. Indikator 5: Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan

Pada tahun 2021, Direktorat PMSS memiliki target output jumlah publikasi pengembangan *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2021, terbentuk tim pelaksana MSA Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari pegawai lintas direktorat, yaitu Direktorat PMSS, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Tim pelaksana dibagi menjadi dua tim kecil, yaitu Tim *Mobile Positioning Data* (MPD) dan Tim *Small Area Estimation* (SAE).

Dalam kegiatan ini, Fungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei berperan dalam mengawal pengadministrasian kegiatan MSA dan menghitung kebutuhan sampel pada kegiatan pendataan lapangan MPD. Hasil MSA (analisis gabungan MPD dan SAE) telah menghasilkan estimasi statistik pada domain estimasi wilayah metropolitan (WM) yang dapat menggambarkan kondisi kewilayahan dalam area metropolitan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif. Hal ini merupakan suatu cerminan bahwa cakupan sampel yang ditetapkan telah mewakili wilayah estimasi yang diinginkan.

Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik berperan dalam membuat rekapitulasi jumlah titik koordinat infrastruktur ekonomi dan kesehatan per kecamatan, rekapitulasi jumlah titik koordinat *Base Transceiver Station* (BTS) 2G, 3G, 4G serta menyediakan peta luas lahan terbangun per kecamatan.

Pemanfaatan data MPD yang berkaitan dengan teknologi seluler sangat berpotensi jika digunakan untuk menghasilkan statistik yang melibatkan mobilitas penggunaannya. Estimasi indikator statistik sosial ekonomi pada level kecamatan menggunakan metode SAE dengan penggunaan data pendukung seperti Susenas, PODES, Sakernas dan data lainnya juga merupakan salah satu upaya dalam hal peningkatan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. MSA (MPD dan SAE) ini diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga harapan untuk menjadikan kegiatan survei-survei BPS disajikan pada domain estimasi wilayah metropolitan dapat terwujud.

3.1.6. Indikator 6: Jumlah pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (*technical assistance*). Pada 2021, seluruh permintaan pembinaan berhasil dilayani oleh Direktorat PMSS. Secara umum, jenis pembinaan kegiatan statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS

No	Jenis Pembinaan	Jumlah
1	Pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik	252
2	Pembinaan dan konsultasi metodologi survei sektoral	17
	Jumlah	269

3.1.6.1. Pembinaan dan Konsultasi Klasifikasi Statistik

Jumlah pembinaan kegiatan statistik terkait klasifikasi statistik dapat diketahui melalui jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi Kementerian/lembaga/institusi/perorangan dan jumlah undangan narasumber dari Kementerian/Lembaga.

Layanan Konsultasi Klasifikasi Statistik disediakan untuk berbagai kalangan pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, maupun KBKI. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi. Di samping itu, laporan menjadi acuan bagi tim layanan konsultasi ke depan dalam memberikan rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang berhubungan dengan penggunaan klasifikasi. Jumlah konsultasi pada periode penyusunan laporan tahun 2021 (Oktober 2020 s.d. September 2021) mencapai 100 persen layanan konsultasi klasifikasi statistik dengan total 153 konsultasi, baik melalui SILASTIK, telepon, kunjungan langsung, email, WA, maupun surat ke Direktorat PMSS.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan/ pelatihan standardisasi dan klasifikasi statistik kepada Kementerian/ Lembaga terkait klasifikasi statistik sebagai narasumber yang melibatkan peserta dalam grup/ sekelompok orang/ unit kerja instansi berdasarkan permintaan/ undangan pada tahun 2020 terhitung 44 kegiatan. Sehingga total pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik sebesar 198 kegiatan dengan 153 konsultasi dan 44 kegiatan lainnya sebagai narasumber.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

- Sistem Pembakuan (SIBAKU) masih perlu pengembangan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna, seperti penambahan fitur baru yang menunjang fitur utama.
- Sibaku Online belum dapat diakses secara publik sebagai salah satu cara pencarian klasifikasi statistik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

- Mengoptimalkan pengalihan layanan melalui daring menggunakan Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik).
- Menyempurnakan transisi ke aplikasi yang terbaru dan menambah fungsi-fungsi dari sistem lama untuk mengoptimalkan sistem yang baru.

3.1.6.2. Pembinaan dan Konsultasi Metodologi Survei Sektoral

Pada tahun 2021, Direktorat PMSS melakukan pembinaan penyusunan metodologi survei sektoral, di antaranya:

1. Pada Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan BNNP Sumatera Barat melakukan pembinaan terkait tata cara listing dan penggunaan peta.
2. Pada Survei Gaya Hidup 2021 yang dilaksanakan oleh BNNP Sumatera Utara dan BNNP Sumatera Barat melakukan pembinaan terkait tata cara listing dan penggunaan peta.
3. Pada *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) yang dilaksanakan oleh Balitbang-Kementerian Kesehatan sebagai narasumber metode *sampling*.
4. Pada PES Pendataan Keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN sebagai narasumber metode *sampling*.
5. Workshop Urgensi Penilaian Integritas Lembaga (SPI, IEPK, Indeks Persepsi Korupsi) yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, sebagai narasumber terkait metodologi.
6. Reviu dan Tindak Lanjut Survei Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Tahun 2020 yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai narasumber untuk memberi masukan terhadap proses Survei Pelayanan Publik yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Ditjen SDPPI.
7. Pengukuran Index Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai narasumber penyusunan pedoman.
8. Perhitungan Indeks Layanan Data dan Informasi Tahun 2021 yang diadakan oleh BNN sebagai narasumber.
9. Audit sampling di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai narasumber.

Sebagian besar pembinaan yang dilakukan terhadap K/L bertujuan untuk menyusun kerangka sampel sesuai kaidah survei serta dapat melakukan pemilihan sampel yang menggunakan *probability sampling* sehingga kualitas statistik sektoral yang dihasilkan menjadi baik. Tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan penyusunan petunjuk teknis yang baku dalam hal penyusunan kerangka sampel dan pemilihan sampel sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik.

3.1.7. Indikator 7: Jumlah kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan. Jumlah kerja sama berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS

No	Jenis Kerja Sama	Jumlah
1	Kerja sama penyusunan metodologi survei sektoral	6
2	Kerja sama klasifikasi statistik	2
3	Kerja sama register usaha	2
	Jumlah	10

3.1.7.1. Kerja Sama Penyusunan Metodologi Survei Sektoral

Secara umum, kerja sama yang dilakukan mencakup penyusunan desain sampling dan kerangka sampel, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan peta wilayah blok sensus, penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.

Selama tahun 2021, Direktorat PMSS melakukan 6 (enam) kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral sebagai berikut:

1. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Balitbangkes-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih; penyediaan peta wilayah blok sensus (9.126 BS); penghitungan penimbang sampling; penyusunan rekomendasi statistik, standar data, standar metadata dan referensi data; dan konsultasi terkait metode sampling.
2. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba (SNPN) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. Ruang lingkup kerja

sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan peta wilayah blok sensus (3.345 BS); penghitungan penimbang sampling; dan konsultasi terkait metode sampling.

3. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan peta wilayah blok sensus (1.416 BS); penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih; penghitungan penimbang sampling; dan konsultasi terkait metode sampling.
4. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan peta wilayah blok sensus (1.280 BS); penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih; dan penghitungan penimbang sampling.
5. Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan (SKKM) yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan daftar sampel blok sensus pengganti; penyediaan peta wilayah blok sensus (2.965 BS); penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih; penghitungan penimbang sampling; dan konsultasi terkait metode sampling.
6. Survei Lanjutan Dampak Covid-19 dengan IVR yang dilaksanakan oleh UNICEF. Ruang lingkup kerja sama adalah melakukan penghitungan penimbang survei.

3.1.7.2. Kerja Sama Klasifikasi Statistik

Selama tahun 2021, kerja sama klasifikasi statistik yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman

Pada tahun 2016, BPS bersama Kemenko Marves telah membangun Klasifikasi Aktivitas Maritim dalam KBLI 2009 (KBLI Kemaritiman 2016). Cakupan aktivitas maritim pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu cakupan KBLI Kemaritiman 2016 juga merujuk pada *Dutch Maritime Cluster* yang mengklasifikasikan aktivitas maritim ke dalam 11 cluster. Namun, di Indonesia dilakukan

penyesuaian dan ditambahkan aktivitas bioteknologi karena dalam Pasal 25 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan bahwa industri kelautan meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritim. Sehingga cakupan KBLI Kemaritiman 2016 terdiri dari sembilan cluster.

Pada tahun 2021, BPS dan Kemenko Marves kembali bekerja sama untuk menyusun KBLI Kemaritiman 2021 sebagai dasar penghitungan PDB Kemaritiman 2021. Cakupan aktivitas maritim dalam KBLI Kemaritiman 2021 sesuai dengan referensi internasional yang telah disepakati antara Kemenko Marves dan BPS, yakni *Ocean Accounts*. *Ocean Accounts* mengklasifikasikan aktivitas maritim ke dalam 31 cluster.

Dari hasil mapping antara cakupan *Ocean Accounts* dengan KBLI Kemaritiman 2016, didapatkan 5 digit KBLI 2020 sebanyak 476 kode. Dari 476 kode tersebut, setelah dilakukan identifikasi dan analisis mendalam, banyaknya kode 5 digit KBLI 2020 yang disepakati sebagai aktivitas maritim yaitu 376 kode. 61 diantaranya tidak tercakup dalam *Ocean Accounts*. Artinya, ke 61 kode tersebut berasal dari cakupan KBLI Kemaritiman 2016 namun tidak tercakup dalam cakupan *Ocean Accounts*. Berdasarkan identifikasi, evaluasi dan kesepakatan bersama, 61 kode tersebut kemudian tetap menjadi bagian KBLI Kemaritiman 2021.

2. Penyusunan Korespondensi KBLI 2020 – CPC 2.0 dan CPC Provisional

Setelah penyusunan KBLI 2020, Kementerian Perindustrian mengundang sebagai narasumber dalam rangka pengelompokan Sektor Jasa Industri yang akan diimplementasikan pada Sistem Informasi Industri Internasional (SIINas) yang memerlukan adanya penyusunan Korespondensi KBLI 2020 – CPC Versi 2 dan CPC Provisional. Korespondensi yang ada di BPS yang terkait dengan CPC (*Central Product Classification*) adalah publikasi/laporan mengenai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI). Beberapa publikasi untuk memperoleh Korespondensi KBLI 2020 dengan CPC adalah:

1. KBLI 2020
2. Korespondensi KBKI dengan KKI 1998/1999, KBLI 2009, dan HS 2012
3. CPC (*Central Product Classification*) vs. 2
4. Provisional Central Product Classification
5. Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2015, dan
6. Tabel Kesesuaian KBLI 2015 – KBLI 2009
7. Publikasi pendukung lainnya.

Penyusunan korespondensi tersebut atas kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dimulai dari bulan Maret tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 secara intensif dilakukan

pembahasan dengan melibatkan BPS sebagai narasumber sebagai pembina klasifikasi statistik. Sejak terbitnya KBLI 2020, pembinaan klasifikasi statistik terus dilakukan bersamaan dengan pembinaan Standar Data Statistik (SDS).

3.1.7.3. Kerja Sama Register Usaha

1. Penyediaan dan pemanfaatan data wajib pajak/ data Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meng-*update* SBR.

Pada tahun 2021, SBR telah menerima data pajak per triwulan yang dikirimkan oleh Kementerian Keuangan. Akan tetapi, beberapa hal pada data tersebut masih belum sesuai dengan standar data yang digunakan oleh SBR. Salah satu data yang belum sesuai tersebut adalah variabel wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Variabel wilayah tersebut masih berupa nama wilayahnya, sedangkan variabel wilayah yang digunakan oleh SBR adalah berbentuk kode wilayah yang mengacu pada Master Files Desa (MFD). Penggunaan MFD tersebut adalah untuk memudahkan pengelolaan data seperti konsistensi isian, melakukan tabulasi, matching. Oleh karena itu, perlu melakukan kodifikasi wilayah data pajak ke MFD.

2. Penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dari LKPP untuk meng-*update* SBR.

Sampai dengan Desember 2021, SBR belum menerima data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dari LKPP.

3.1.8. Sistem/Aplikasi yang Dibangun dan Dipelihara oleh Direktorat PMSS

Sistem/aplikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik. Sistem/aplikasi ini digunakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis dan evaluasi sampai dengan diseminasi kegiatan. Terdapat 8 (delapan) sistem/aplikasi yang dibangun dan dipelihara dengan rincian sebagai berikut:

1. Aplikasi Pemutakhiran MFD dan MBS (MFDOnline)

MFDOnline merupakan Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web yang digunakan untuk mengumpulkan informasi perubahan wilayah serta melakukan

pemeliharaan master wilkerstat. Output MFDOnline dapat memberikan informasi sejarah perubahan wilayah yang dapat dicatat dari waktu ke waktu dan menghasilkan Daftar Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat). Master Wilkerstat yang lebih dikenal dengan Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) dijadikan rujukan dalam kegiatan sensus dan survei BPS dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasilnya. Sejak tahun 2010 MFDOnline mulai diimplementasikan untuk merekam perubahan wilayah yang terjadi sampai tingkat blok sensus. Hasil pemutakhiran dirilis setiap semester dalam setiap tahunnya berupa Peraturan Kepala BPS tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik.

MFDOnline sejak pertama kali diimplementasikan 2010 telah mengalami pengembangan guna meningkatkan performa dan melengkapi fasilitas yang ada. Secara fungsi dan manfaat sistem yang ada sampai sekarang telah dapat memberikan hasil guna yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perubahan master wilkerstat. Namun perlu penyesuaian dari sisi teknologi, perkembangan kebutuhan pengelolaan master wilkerstat yang makin pesat, serta kebutuhan pengembangan metodologi.

Setelah rangkaian kegiatan Sensus Penduduk 2020, saat ini Fungsi PKS mengelola 2 (dua) macam master blok sensus (BS), yaitu BS 2010 dan BS 2020. Untuk kepentingan survei bidang Statistik Produksi sampai pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan survei bidang Distribusi Jasa sampai kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Sedangkan survei bidang statistik Sosial dan seluruh survei ke depan menggunakan BS 2020 yang merupakan kerangka sampel terbaru hasil Sensus Penduduk 2020. Selain BS juga ada master SLS sebagai alternatif *enumeration area*. Kondisi master SLS juga relatif dinamis sehingga memerlukan pengelolaan tersendiri.

Mengingat master wilkerstat digunakan hampir di seluruh tahapan kegiatan statistik, maka pengelolaan dan pemeliharaannya menjadi sangat penting. Adanya ketidakefektifan beberapa kegiatan yang tercermin dalam layanan menjadi dasar yang kuat bahwa isu ini harus segera diselesaikan.

Sejalan dengan *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* dan *Statistical Business Framework and Architecture (SBFA)* yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, BPS secara bertahap membangun beberapa sistem dari diantaranya *Data Management System*, *Integrates Collection System (ICS)*, *Frame and Register System*, *Metadata System*, *Dissemination System*, dan *Geospatial System*. Pengelolaan master wilkerstat ini menjadi bagian dari *Frame and Register System (FRS)*, yaitu sebagai *data reference* bagi sistem-sistem lain yang membutuhkannya. Untuk itu keberlangsungan dan pengembangan MFDOnline sebagai alat bantu dalam pengelolaan master wilkerstat menjadi kebutuhan yang penting.

Aplikasi New-MFDOonline

Tahun 2021 MFDOonline dibangun kembali dengan *upgrade* teknologi pengembangan aplikasi sekaligus memperbaiki layanan yang sebelumnya kurang optimal. Layanan/fasilitas tambahan yang disediakan, yaitu pengelolaan master BS2020, master SLS, serta pelaporan/pengecekan/pengolahan yang terintegrasi dalam sistem aplikasi.

Tabel 3.7. Perkembangan Cakupan Pengelolaan Master Wilkerstat

MFDONLINE	New-MFDONLINE
Perubahan wilayah administrasi	Perubahan wilayah administrasi
Perubahan blok sensus (BS2010)	Perubahan blok sensus (BS2010)
-	Perubahan blok sensus (BS2020)
-	Perubahan Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Pengembangan ini dilakukan dengan *resource* internal BPS, yaitu kolaborasi antara Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) sebagai pengembang sistem dengan Tim Direktorat Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) sebagai *subject matter*. Pengembangan dilakukan secara bertahap dalam 1 – 2 tahun. Capaian target tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pemetaan kebutuhan dalam skala prioritas dan melakukan perancangan aplikasi; Tahap pertama prioritas pengembangannya di tahun 2021 adalah membangun *platform* sistem yang memungkinkan terintegrasi dengan sistem besar di BPS, serta fasilitas pelaporan perubahan dari daerah ke pusat.

b. Membangun aplikasi sesuai target capaian tahap pertama; New MFDOonline diakses melalui jalur VPN BPS. Peningkatan dari aplikasi MFDOonline sebelumnya adalah pada dimensi:

- Teknologi yang lebih mutakhir, dirancang dapat berkomunikasi dengan sistem lain melalui pertukaran *service* (API);
- Sistem pelaporan, pengelolaan dan pengolahan master wilkerstat yang terintegrasi dalam satu sistem;

- Meningkatkan peran penanggung jawab pengelolaan master wilkerstat tiap tingkatan wilayah mulai BPS Kabupaten/Kota, BPS Provinsi dan BPS Pusat dan mudah dipantau/dimonitor dalam sistem.

c. Melakukan ujicoba aplikasi kepada 5 (lima) provinsi terpilih;

Kegiatan ini dilakukan pada awal Juni 2021 secara *online*. melibatkan IPDS Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah tersebut dipilih berdasarkan kasus perubahan wilayah yang terjadi pada masing-masing wilayah sehingga mewakili setiap jenis perubahan yang dapat dikelola dalam MFDOnline.

d. Sosialisasi New MFDOnline

Bulan Juli 2021, Direktorat PMSS melakukan sosialisasi New MFDOnline kepada BPS Provinsi seluruh Indonesia, yaitu Sub Koordinator Fungsi Jaringan dan Rujukan Statistik, yang diintegrasikan dengan kegiatan *Capacity Building* Bidang Metodologi Sensus dan Survei tahun 2021; Sosialisasi dilaksanakan 1 (satu) hari dengan cakupan penjelasan proses bisnis baru pengelolaan master wilkerstat, pengenalan tata cara penggunaan New MFDOnline, dan praktek penggunaan aplikasi.

e. Implementasi aplikasi New MFDOnline

New MFDOnline mulai diimplementasikan untuk pemutakhiran master wilkerstat semester 2 tahun 2021. Aplikasi ini dibuka melebihi dari jadwal yang ditetapkan dikarenakan persiapan migrasi dan pengujiannya. Setelah dipastikan dari sisi keamanan dan aspek-aspek lainnya, Oktober 2021 New MFDOnline dibuka untuk proses pelaporan perubahan wilayah.

Dengan capaian tersebut masih terdapat ketidaksempurnaan baik dalam pengembangan maupun implementasinya. Pada pengembangan tahap 2 tahun 2022, akan difokuskan pada perbaikan fasilitas yang sudah ada, dan pengembangan fasilitas berikutnya yang menjadi prioritas tahap kedua. Beberapa kendala yang dihadapi dalam persiapan maupun implementasi MFDOnline adalah sebagai berikut:

- Aplikasi New MFDOnline dibangun menggunakan *resource* internal BPS yang memiliki kesibukan dan beban tugas lainnya yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa kesempatan penyelesaian modul aplikasi menjadi tertunda dan pada akhirnya dialihkan kepada anggota tim lainnya;
- Pada awal pembangunan aplikasi, beberapa anggota tim *developer* masih fokus pada pemulihan layanan aplikasi yang terdampak serangan *ransomware*, sehingga jadwal MFDOnline tertunda;

- Terbatasnya waktu pengujian aplikasi sehingga belum dapat mengukur *work load* di akhir periode pemutakhiran dimana biasanya jumlah pengakses MFDOnline mencapai jumlah maksimal.

Strategi yang diterapkan guna menghadapi kendala tersebut adalah:

- *Knowledge Sharing & Sprint Review*
Tim MFDOnline melakukan rapat/diskusi rutin setiap minggu dengan agenda *Knowledge sharing* dari tim Metodologi kepada tim SIS untuk menjelaskan kebutuhan dan proses bisnis kegiatan, kemudian dilanjutkan pembahasan progres pengembangan aplikasi dari Tim SIS disampaikan kepada Tim Metodologi. Dengan cara ini setiap minggu masing-masing tim berprogres dalam penyelesaian target.
- Komunikasi dan Pengujian Aplikasi melalui GIT
Dokumentasi pembangunan aplikasi, komunikasi tim dan ujicoba modul-modul yang telah dikerjakan disimpan dalam GIT, sehingga memudahkan baik tim developer dalam diskusi maupun tim metodologi dalam memantau progres pengembangan.

2. Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame)

Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame) dibangun untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di Pengembangan Kerangka Sampel sejak 2019. iFrame merupakan sebuah sistem terintegrasi untuk mengelola kerangka induk, kerangka sampel serta sampel-sampel yang terpilih pada setiap survei yang menerapkan kaidah sampling di BPS.

iFrame merupakan aplikasi berbasis web yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Modul Frame yang berfungsi untuk mengelola kerangka sampel beserta informasi pendukungnya.
- b. Modul pengelolaan data sampel yang berfungsi untuk mengelola data sampel survei baik berupa sampel area maupun sampel unit/rumah tangga.
- c. Modul Data Sensus yang berfungsi untuk mengelola data hasil sensus yang dilakukan BPS.

Pengembangan iFrame dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya internal BPS, yaitu kolaborasi antara Direktorat Sistem Informasi Statistik dan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Telah diimplementasikan pada pengelolaan survei-survei sebagai berikut:

- Survei KAKAO 2019
- Komstrat Tebu 2019
- Shopi 2019
- Ubinan Padi

- Ubinan Palawija

Dengan diimplementasikannya iFrame pada survei-survei tersebut, pengiriman daftar sampel ke daerah, pelaporan penggantian sampel, penarikan sampel dapat dilakukan dalam sistem. Sehingga membantu optimalisasi pelaksanaan pekerjaan yang selama ini dikerjakan di luar sistem.

3. Aplikasi Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Sibaku Online dan Sibaku Mobile

Pengguna klasifikasi yang semakin meningkat, baik oleh kalangan internal maupun eksternal BPS, mengharuskan adanya pemeliharaan suatu sarana untuk memudahkan para pengguna klasifikasi dalam mencari suatu kode, judul, atau deskripsi klasifikasi. Dalam rangka memfasilitasi pengguna, maka Direktorat PMSS mengembangkan suatu sistem aplikasi pencarian kode klasifikasi berbasis *web* (SPK Online) pada tahun 2010. Dalam perkembangannya, SPK Online telah didukung dalam bentuk sistem aplikasi multiplatform, yang tidak hanya berbasis *web*, tetapi juga berbasis desktop dan *mobile*. Sistem aplikasi berbasis desktop, yang diberi nama SPK *Offline*, ditujukan untuk penggunaan operasional petugas/pengawas lapangan tanpa memerlukan koneksi internet. Sedangkan sistem aplikasi berbasis *mobile* yaitu SPK Android, ditujukan untuk kemudahan pencarian dengan menggunakan *smartphone* dengan sistem operasi Android. SPK Online juga dikembangkan dengan penambahan modul Standarisasi Lapangan Usaha (Standlapus) yang mencakup fungsi pendokumentasian hasil diskusi pertanyaan-pertanyaan KBLI yang dikhususkan untuk penggunaan internal Fungsi PSKS. Dengan dikembangkannya Standlapus, pelayanan klasifikasi statistik yang diberikan dapat lebih optimal dan terjaganya kesamaan pemahaman klasifikasi statistik antara tim klasifikasi statistik.

Dimulai tahun 2020, sistem aplikasi SPK dikemas ulang dengan nama baru yaitu Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) agar lebih mudah diingat oleh pengguna. SPK Online dikemas ulang menjadi Sibaku Online dan SPK Android dibangun ulang menjadi tidak hanya berbasis Android tetapi juga berbasis iOS menjadi Sibaku Mobile. Desain ulang SPK dimaksudkan agar penyebaran informasi dan pencarian kode berjalan lebih efektif, yakni dengan membuatnya lebih ramah pengguna. Sibaku Online dan Sibaku Mobile telah diluncurkan secara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2020 bersamaan dengan peluncuran publikasi KBLI 2020. Sibaku Mobile juga sudah tersedia untuk publik pada marketplace android (Play Store) dan iOS (App Store). Pemanfaatan Sibaku Online dan Sibaku Mobile terus berlangsung sampai tahun 2021, terutama pada survei-survei yang membutuhkan pencarian kode klasifikasi secara tepat dan cepat.

Sibaku Online merupakan sistem aplikasi transisi yang bersifat *landing page* (link ke sistem aplikasi lain) dan hanya pengemasan ulang dari fitur-fitur SPK Online. Hal ini

dikarenakan SPK Online akan dimigrasikan ke platform metadata yang terintegrasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik yaitu *Metadata Management System (MMS)*. Proses migrasi basis data statistik sudah dilakukan untuk klasifikasi terbaru yaitu KBJI 2014, KBLI 2015, dan KBKI 2015. Perancangan desain dan analisis sistem dilakukan bersama tim MMS.

Fitur-fitur Sibaku Online meliputi menu klasifikasi statistik (pencarian, tabel kesesuaian, tanya kode (diarahkan ke Silastik), dan unduh publikasi klasifikasi (diarahkan ke halaman website BPS) dan standar data (pencarian standar data versi 1 dan ujicoba pengajuan usulan standar data). Menu layanan konsultasi klasifikasi statistik telah diintegrasikan ke Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik). Sedangkan fitur-fitur Sibaku Mobile yang dikembangkan pada tahun 2020 meliputi:

1. Mencari Kode (saat membuka aplikasi / pada home)
2. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang sama
3. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang berbeda
4. Mengatur, filter hasil pencarian
5. Mencari berdasarkan pencarian terakhir
6. Mencari konsep dan definisi (masih dalam proses)

Masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan MMS, Sibaku Online dan Sibaku Mobile:

1. Terdapat kendala yang belum mendapat solusinya pada keamanan source code yang belum lulus uji keamanan jaringan, sehingga Sibaku Online belum dapat diakses oleh publik dan hanya bisa diakses internal melalui jaringan VPN.
2. SDM yang dimiliki tidak hanya fokus dalam pengembangan sistem Sibaku dan MMS saja karena adanya beban pekerjaan lain yang bersamaan waktu.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala:

1. Pemilihan fitur prioritas untuk pengembangan Sibaku Online dan Sibaku Mobile
2. Berkonsultasi dengan Fungsi Jaringan Komunikasi Data untuk pengecekan jaringan dan identifikasi permasalahan. Link Sibaku Online selama masa perbaikan uji keamanan dikembalikan untuk sementara ke halaman SPK Online.
3. Konsultasi dengan tim Fungsi Pengembangan Basis Data terkait Migrasi database klasifikasi dan standar data.
4. Melakukan evaluasi pengembangan fitur-fitur dan ekstensi sistem SPK Online untuk dicakup dalam spesifikasi Metadata System.

4. Aplikasi Sistem *Statistical Business Register (SBR)*

Pengembangan sistem SBR dimulai pada tahun 2019, dimana Sistem SBR menjadi salah satu modul yang tergabung dalam Sistem Frame and Register (*Frame Register System/FRS*), dengan nama Modul Pengelolaan Data Bisnis. Pengembangan FRS (termasuk didalamnya modul SBR), dikembangkan oleh pihak ke-3 dengan sistem lelang. Akan tetapi sampai akhir tahun 2019, FRS belum dapat diselesaikan dan progress nya mencapai 90,14%. Khusus untuk Modul Pengelolaan Data Base (SBR), disebutkan bahwa pencapaian deliverable menjadi milik PPK, dalam hal ini BPS.

Terkait hasil akhir pengembangan FRS yang belum selesai, pada tahun 2020, diputuskan untuk melakukan pengembangan yang berfokus pada Modul Pengelolaan Database Bisnis atau SBR. Modul SBR direncanakan untuk dikembangkan secara *In-House*, dengan berbekal *Source Code* yang tersimpan pada environment BPS. Untuk melanjutkan pengembangan dari konsultan, kegiatan *assessment* SBR dilakukan terhadap FRS Modul SBR dari konsultan, baik *source code* maupun antarmuka sistem yang sudah ada. Selanjutnya dari hasil *assessment* disusun *Functional Requirement (FR)* pengembangan sistem SBR berdasarkan pada *requirement* awal pembangunan FRS khususnya modul Pengelolaan Database Bisnis, serta membuat prioritas terkait pencapaian untuk tahun 2020. Pembahasan FR dilakukan untuk mendapat FR final sebagai sumber revisi pengajuan anggaran konsultan dan pembuatan *backlog* ke depan. Karena waktu yang terbatas pada 2020, maka pembahasan FR juga meliputi mana saja yang merupakan item prioritas. Prioritas ini dimaksudkan khususnya untuk uji coba implementasi petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.

Kemajuan pengembangan sistem pada tahun 2021 meliputi penyusunan Requirement System yang kemudian dibuat dan didetailkan menjadi backlog. Backlog akan disertai dengan target pengerjaan; pengembangan sistem SBR tahap/milestone 1 dan pengembangan sistem SBR tahap/milestone 2 yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sistem SBR Tahap/Milestone 1

Pada tahap pertama, pengembangan diutamakan pada fitur dasar yang dibutuhkan. termasuk di dalamnya adalah:

- Pengadaan, konfigurasi server dan database yang digunakan beserta fitur yang perlu diaktifkan dari sisi server
- Pengembangan auto deployment ke server pengembangan ketika sistem sudah diunggah pada manajemen source code BPS
- Pengembangan menu login yang disesuaikan dengan mekanisme BPS melalui Single Sign On (SSO) dan hak akses pengguna yang login

- Pengembangan menu lihat data perusahaan yang berada pada data live SBR, termasuk di dalamnya filter berdasarkan beberapa kriteria tertentu
 - Pengembangan menu tambah, edit perusahaan secara manual untuk menangani perusahaan baru yang diperoleh bukan dari sumber survei BPS ataupun data administratif
 - Pengembangan menu riwayat perubahan pada suatu perusahaan sehingga diketahui apa saja yang berubah dan sumbernya
- b. Pengembangan Sistem SBR Tahap/Milestone 2

Penyelesaian terhadap target milestone 1 lalu dilanjutkan dengan melakukan pengembangan pada tahap berikutnya. Fokus pada milestone 2 adalah terkait integrasi data, karena beberapa sumber data sudah tersedia untuk memperbarui data SBR:

- mengambil/mengakses data dari sistem lain;
- transformasi variabel ke format data SBR;
- validasi sumber data yaitu identifikasi duplikat, evaluasi kelengkapan isian variabel, pembersihan, standardisasi isian
- pembaruan data master/live SBR
- dashboard profil SBR

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Impor data, *cleaning*, dan *matching* data membutuhkan waktu lama
2. Pengembangan sistem SBR belum optimal dikarenakan perubahan struktur basis data yang harus disesuaikan *subject matter* menyebabkan beberapa fitur sistem perlu disesuaikan.
3. Beban dan jadwal pekerjaan yang bersamaan membutuhkan SDM yang fokus dalam pengembangan sistem.
4. Belum mempunyai sistem dalam membuat master frame secara otomatis sehingga pengerjaannya kurang efisien.
5. Adanya variabel-variabel kebutuhan Neraca yang belum terakomodasi.
6. Adanya beberapa error dalam fungsi profiling perusahaan.
7. Sistem belum dapat digunakan untuk memproses *query* usaha/perusahaan oleh pengguna yang tidak terlalu paham dengan SQL Server
8. Sistem belum dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan serta pengelolaan beban responden.
9. Sistem belum mampu untuk melakukan pencatatan perubahan data dengan baik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Penyusunan analisis fungsi (*functional requirements*) dan menetapkan prioritas minimal untuk pengembangan Sistem SBR sebagai bagian dari *Frame Register System (FRS)*
2. Membentuk tim kolaborasi statistik terintegrasi meliputi perwakilan/*liaison officer (LO) subject matter*, neraca, dan kedeputan MIS untuk mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk dicakup dalam SBR dan membangun standar data/ variabel awal yang ke depan disepakati dan digunakan bersama.
3. Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan ID SBR dalam proses integrasi dan pemutakhiran data hasil survei subject matter ke dalam basis data SBR.
4. Berkoordinasi dengan tim Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk mencari solusi guna peningkatan performa sistem SBR, melalui pengembangan sistem yang mendukung SBR
5. Mendokumentasikan dan melakukan evaluasi proses bisnis pemutakhiran *survey feedback* dan data administratif untuk dibangun petunjuk teknis dan tata kelola yang lebih efisien ke depan.

5. Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web

Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web dibuat dan dikembangkan untuk mempermudah proses penggantian sampel KSA yang umumnya terjadi dalam setiap bulan pengamatan. Kegiatan penggantian sampel KSA yang sudah dalam sistem berbasis web dapat lebih cepat diproses, dapat di-monitor secara berkala, dan dilakukan sinkronisasi. Di tahun 2021, pengembangan sistem yang telah dilakukan adalah:

- a. Aplikasi web KSA sudah terintegrasi dengan Aplikasi KSAPro.
- b. Implementasi KSA sudah single mode (KSAPro mandiri)
- c. Penambahan fasilitas updating master area sampling frame

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Aplikasi masih terus dikembangkan karena ada perubahan kebutuhan yang dinamis
- Master area frame yang di-update masih sebagian sehingga masih perlu meng-update kerangka sampel keseluruhan. Master frame juga belum mengikuti perkembangan pemekaran wilayah.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah:

- Pengembangan sistem terus dilakukan sesuai kebutuhan dan dilakukan bertahap.
- Master frame masih tetap menggunakan master yang lama sampai dilakukannya updating frame. Updating frame akan dikembangkan selanjutnya sesuai kondisi

terbaru dari sisi cakupan lahan baku sawah (LBS) dan batas wilayah kecamatan terbaru.

6. Pengembangan Aplikasi Wilkerstat

Aplikasi Wilkerstat merupakan aplikasi berbasis android yang digunakan untuk membantu petugas lapangan dalam mengenali wilayah kerjanya, mengambil titik koordinat (geotagging) dan foto suatu landmark atau infrastruktur, dan dapat juga melakukan monitoring petugas lapangan.

Pada tahun 2021, Aplikasi Wilkerstat dikembangkan untuk kegiatan statistik pariwisata yang dilaksanakan oleh seksi Statistik Distribusi, yaitu untuk *updating* direktori pariwisata, survei hotel tahunan, survei restoran UMB, dan survei usaha makan minum UMK.

Dalam kegiatan survei pariwisata, hasil geotagging lokasi jasa pariwisata yang direkam dengan aplikasi wilkerstat akan memperoleh kode unik ID wilkerstat. Kode tersebut harus diinput ke aplikasi web entri bersamaan dengan isian kuesioner. Aplikasi web entri akan mengakses service ke aplikasi wilkerstat untuk memastikan ID wilkerstat tersebut terdaftar.

Dalam kegiatan mempersiapkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), aplikasi wilkerstat digunakan dalam kegiatan Studi dan Ujicoba Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023. Aplikasi wilkerstat digunakan untuk geotagging batas SLS, geotagging infrastruktur pertanian, dan geotagging sampel lahan pertanian.

Aplikasi Wilkerstat juga digunakan untuk Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) Desember 2021. Aplikasi ini digunakan untuk pengumpulan titik koordinat lokasi ruta SEPBS, *geotagging* dan mengambil foto kondisi rumah responden. Hasil geotagging SEPBS sejumlah 21.571 rumah tangga yang terdiri dari 1.758 rumah tangga miskin ekstrim dan 19.953 rumah tangga non miskin ekstrim, dengan akurasi rata-rata 4,89 meter. Dalam kegiatan SEPBS, data spasial pendukung lainnya adalah peta desa wilkerstat BPS dan titik geotagging infrastruktur yang digunakan sebagai visualisasi akses infrastruktur terdekat. Sebagai pendukung hasil geotagging wilkerstat dalam analisis spasial adalah karakteristik tipologi wilayah, kawasan pantai, karakteristik tutupan lahan, dan kawasan kepadatan penduduk. Service web peta pendukung dalam visualisasi dan kebutuhan analisis adalah kawasan kepadatan penduduk hasil SP2020 dalam grid wilayah terbangun 100 m x 100 m, karakteristik tipologi wilayah/*landform*, dan peta SLS.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Ada kasus ID yang tidak sama antara wilkerstat dan aplikasi *webentry* karena masing-masing sistem terpisah. Penamaan project dan pengisian kode yang tidak sesuai oleh petugas akan memengaruhi proses pengolahan nantinya.
- Kondisi jaringan internet di beberapa wilayah yang masih terbatas sehingga khawatir akan membebani lamanya proses *geotagging* di lapangan.
- Kendala waktu yang terbatas dalam pengembangan aplikasi.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Operator pengolahan *webentry* melakukan *matching* secara manual. Diperlukan koordinasi ke kabupaten/kota dengan memberikan rekap secara berkala dan pemberitahuan terkait pemeriksaan terhadap penamaan dan kode yang tidak sesuai.
- Beberapa wilayah yang mengalami jaringan internet yang lambat, menggunakan aplikasi open camera untuk pengambilan foto *geotagging*.
- Dalam pengembangan aplikasi dengan kondisi penyesuaian kebutuhan dan waktu yang sempit, ada beberapa rule validasi yang dilepas dan beberapa fitur tidak diaplikasikan.

7. Pengembangan *Geospatial System* (GS)

Geospatial System dibangun untuk mendukung proses bisnis SBFA (*Statistical Business Framework and Architecture*) yang berkaitan dengan fungsi *Geospatial System* dan saling terintegrasi dengan sistem lainnya di lingkungan BPS. Pada tahun 2021 telah dilakukan penambahan fitur digitalisasi titik bangunan hasil SP2020. Adanya GS sangat bermanfaat dalam:

- Manajemen data geospasial.
- Memudahkan dalam mengakses data geospasial baik dalam *raw* data maupun *service API* (*Application Programming Interface*).
- Memudahkan dalam memonitor progress dan kualitas data geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota.
- Memudahkan mekanisme *approval* berjenjang terhadap data geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota.
- Memudahkan sistem lain untuk mengakses data geospasial dalam bentuk *service API*.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Kebutuhan *storage* yang sangat besar.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Koordinasi lebih lanjut dengan Fungsi Jaringan Komunikasi Data untuk menambah *storage*.

8. Pengembangan WebGIS

WebGIS adalah Sistem Informasi Geografis berbasis web. Situs ini bertujuan untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data. WebGIS sudah dibangun sejak 2017. Pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan peta interaktif berupa Peta Kepadatan Penduduk 2020, Peta Inflasi dan Peta Wilkerstat sampai tingkat SLS.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Aplikasi ArcGIS Server mengalami *down* karena efek beberapa server terkena serangan virus

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Install dan konfigurasi ulang.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020

Dibandingkan tahun 2020, terdapat perubahan jumlah indikator. Jumlah indikator tahun 2021 bertambah dari sebelumnya sebanyak lima indikator menjadi tujuh indikator. Indikator yang bertambah adalah jumlah publikasi pengembangan *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Selain itu pada 2021, indikator pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei dipecah menjadi dua, pembinaan dan kerja sama masing-masing menjadi indikator tersendiri.

Selanjutnya juga terdapat perubahan satuan indikator kinerja. Satuan indikator kinerja yang berubah adalah jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran. Sebelumnya satuan indikator ini berupa jumlah dokumen dan tahun 2021 berubah menjadi persentase. Begitu juga pada satuan indikator permintaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani, sebelumnya berupa jumlah permintaan/kerja sama dan pada 2021 berubah menjadi persentase. Satuan berupa persentase dinilai lebih baik untuk menilai suatu capaian kinerja.

Dari hasil penghitungan capaian kinerja, baik tahun 2021 maupun 2020 sama-sama menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun. Perbandingan capaian kinerja secara lebih detail disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Direktorat PMSS Terhadap Target Renstra 2020 dan 2021

2020	2021		2020		2021		Capaian Kinerja	
Indikator Kinerja Utama	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas								
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	47 dokumen	59 dokumen	100%	105,9%	125,53%	105,88%
Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	5 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	120,00%	100,00%
Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100%	100 %	100%	100%	100,00%	100,00%
	Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan Metropolitan Statistical Area (MSA)			2 publikasi	2 publikasi		100,00%

2020	2021		2020		2021		Capaian Kinerja	
Indikator Kinerja Utama	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data								
Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei			75 kegiatan	158 kegiatan			210,67%	
	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani			100%	100%		100,00%
	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani			100%	100%		100,00%

3.3. Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Direktorat PMSS 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100	100	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100	105,88	105,88
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi /Laporan	4	4	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100,00
Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)	Publikasi	2	2	100,00
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan	Persen	100	100	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi 2021	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	survei yang dilayani				

3.4. Prestasi

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2021 diantaranya:

1. Aplikasi pengembangan MFDOnline, menggantikan MFDOnline yang lama yang diimplementasikan mulai periode pemuatn 2021 semester 2. Aplikasi telah terlebih dahulu disosialisasikan kepada BPS Seluruh Indonesia.
2. Tahap awal kajian pemuatn Satuan Lingkungan Setempat (SLS) telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, serta internal BPS yaitu Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Transformasi Statistik dan Biro Perencanaan.
3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame), berupa Aplikasi Penarikan Sampel Ubinan Padi, dan Aplikasi Sampling Ubinan Palawija untuk membantu penarikan sampel, pengelolaan laporan daerah, penggantian sampel dan monitoring terkait sampel pada kegiatan Ubinan Padi, dan Ubinan Palawija.
4. Pemanfaatan *remote sensing* dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk klasifikasi tutupan lahan pertanian.
5. Terdapat wakil dari Direktorat PMSS yang berpartisipasi aktif dalam *Webinar SDG 9 Indicators* yang diadakan oleh SESRIC bersama 18 negara lain dan mempersentasikan *Geospatial Approach to Identifying The Proportion of Population Covered by A Mobile Network*.
6. Terdapat wakil dari Direktorat PMSS yang berpartisipasi aktif dalam *Twenty-ninth Session of Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics* yang diadakan FAO dan mempresentasikan *Land cover mapping through remote sensing and machine learning for Indonesian Census of Agriculture 2023*.
7. Tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan data wajib pajak sebagai sumber pemuatn data administratif SBR secara reguler; sudah secara bertahap mengirimkan data yang dibutuhkan oleh SBR serta inisiasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk kolaborasi

data administratif seperti kerjasama dengan LKPP dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

8. Terbitnya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional yang merupakan bentuk implementasi Prinsip Satu Data Indonesia khususnya prinsip pertama terkait standar data.
9. Tersusunnya Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2021 yang berisi cakupan KBLI 2020 yang masuk dalam ruang lingkup PDB kemaritiman. Cakupan ini sebagai cikal bakal perhitungan PDB Kemaritiman yang akan menggambarkan potensi perekonomian sumber daya kelautan di Indonesia.
10. Data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016 mulai digunakan sebagai kerangka (*frame*) survei *subject matter* secara bertahap. Kegiatan *updating* direktori Pariwisata dan dilanjutkan Survei Statistik Pariwisata tahun 2021 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan *subject matter* Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke SBR untuk input pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi dengan kode wilayah kerja statistik dan *geocode* (*latitude* dan *longitude*). Data SBR yang telah diperbarui dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei Statistik Pariwisata pada tahun 2022. Metode ini disebut pemutakhiran *survey feedback* yang akan berjalan secara reguler dan terus akan diperluas dengan survei survei lainnya di Subject matter.
11. Partisipasi aktif tim SBR dalam beberapa kegiatan/forum internasional yang diikuti pada tahun 2021 antara lain: keikutsertaan tim SBR dalam Tim Task Force Globalisasi dan Digitalisasi dalam Komite Ahli PBB terkait Statistik Usaha dan Perdagangan/ United Nations Committee of Experts on Business and Trade Statistics (UNCEBTS); partisipasi dalam pilot survei dan pertemuan UNCEBTS; partisipasi dalam pertemuan Wiesbaden Group; diskusi progress dan tantangan SBR dalam technical assistance (TA) Australian Bureau of Statistics (ABS) di bawah payung Program Kerja Sama BPS dan ABS; kontribusi dalam memberikan tanggapan terkait dokumen agenda sidang pada 52nd Session of the United Nations Statistical Commission (UNSC) 1-5 Maret 2021 oleh United Nations Statistical Division (UNSD) yaitu dokumen 3(e) Business and Trade Statistics; partisipasi penulisan satu bab buku dengan penerbit Wiley berjudul *Advances in Business Statistics, Methods and Data Collection* berkolaborasi dengan ABS.
12. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut terpartisipasi dalam Lomba Bedah Data APBD 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan meraih Juara Harapan I dengan kajian ilmiah

berjudul APBDLooks: Aplikasi Web untuk Melihat Realisasi APBD Secara Komprehensif Berbasis Machine Learning.

13. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Lomba Hackaton IT Summit 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan meraih Juara II dengan kajian ilmiah berjudul *SynTax : VAT & Cross-Border Detection*.
14. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Jaga Data Challenge 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meraih Juara II dengan kajian ilmiah berjudul Mantau BOS: Deteksi Anomali dan Optimalisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
15. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Kompetisi BPJS Kesehatan Hackathon 2021 dan meraih juara I dengan kajian ilmiah *Mockup Analysis Case and Cost* BPJS.
16. Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam *Data Science Weekend 2021* yang diselenggarakan *Data Science* Indonesia dan meraih juara II dengan kajian ilmiah mengenai analisis data kemacetan di Jawa Barat menggunakan data *time series* dan *waze*.

3.5. Kegiatan Prioritas 2021

Kegiatan prioritas Direktorat PMSS pada tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Digitalisasi Titik Bangunan Hasil SP2020.
2. Studi Penyusunan Kerangka Geospasial ST2023.
3. Ujicoba Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023.
4. Penggunaan Aplikasi Wilkerstat dalam kegiatan Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) Desember 2021.
5. Pengembangan MFDOnline.
6. Kajian Prosedur Pemutakhiran Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
7. Metropolitan Statistical Area.
8. Penyusunan Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2021,
9. Penyusunan Standar Data Statistik Nasional tahun 2021 dalam Satu Data Indonesia

3.6. Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Dalam rangka mendukung program pemerintah menangani pandemi COVID19, maka dilakukan penghematan pada beberapa pos anggaran antara lain pelaksanaan pelatihan dan workshop secara online. Penyampaian materi melalui video conference sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan *workshop*.
2. Pengembangan MFDOnline dilaksanakan sepenuhnya dengan *resource* internal BPS, dari analis sistem sampai tim pengembang aplikasinya. Kegiatan ini melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
3. Pelaksanaan sosialisasi MFDOnline terintegrasi dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Metodologi Sensus dan Survei yang mengundang peserta dari BPS Provinsi. Dengan kegiatan ini dapat melakukan efisiensi dari waktu dan biaya pelatihan.
4. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan *software* tidak berbayar (*open source*). *Developer* aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan *software*.
5. Pemanfaatan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
6. Pelaksanaan pembinaan Standar Data Statistik Nasional tahun 2021 terkait pelaksanaan Sensus Pertanian (ST) tahun 2023 dengan LO dari BPS dan Kementerian/Lembaga terkait ST2023 dan pembinaan Kementerian UMKM.
7. Publikasi Tabel Kesesuaian KBLI 2020 – KBLI 2015 dan penyusunan Standar Data Statistik Nasional menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat maupun FGD, menyikapi masih adanya Pandemi Covid 19
8. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang hari, tidak bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat prasarana (misal meminimalisasi penggunaan kertas/*paperless*).

3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik selama tahun 2021 adalah sebesar 1,05 triliun rupiah. Realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu 2021 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2021 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
1	Data dan Informasi Publik	4.978.255.000	4.430.068.180	88,99
2905. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan				
2	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	47.500.000	43.363.946	91,29
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
3	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	163.605.000	144.283.680	88,19
	Jumlah	5.189.360.000	4.617.715.806	88,99

Secara umum, penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sudah dilakukan dengan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 88,99%. Penyerapan anggaran tertinggi pada kegiatan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Kode 2905) sebesar 91,29 persen dan yang terendah pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Kode 2910) sebesar 88,19%.

BAB 4. PENUTUP

4

4.1. Tinjauan Umum

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Semua target sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat pencapaian indikator secara rata-rata sebesar 100,84 persen.

4.2. Tindak Lanjut

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan oleh pengambil kebijakan menjadi tantangan bagi Direktorat PMSS untuk dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2021 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- 2) Peningkatan jumlah SDM terutama pada Fungsi Pengembangan Register Usaha yang pada Desember 2021 baru berjumlah lima orang.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- 4) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System* (GIS) dan *Remote Sensing* (RS) untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, kerangka geospasial tutupan lahan pertanian, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu

ditingkatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data lapangan dan pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.

- 5) Integrasi antar-sistem perlu dilakukan sehingga semua pekerjaan tidak lagi dilakukan secara manual dan konsisten, seperti manajemen data SBR, kerangka sampel, peta wilkerstat, dan lain-lain. Sistem yang terus dikembangkan adalah *Geospatial System* dan yang harus dibuat adalah *Frame Register System*.
- 6) Penguatan statistik sektoral khususnya terkait pembinaan dan sosialisasi Satu Data Indonesia.
- 7) Perlunya mengimplementasikan manajemen perubahan dan manajemen risiko secara lebih detail.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

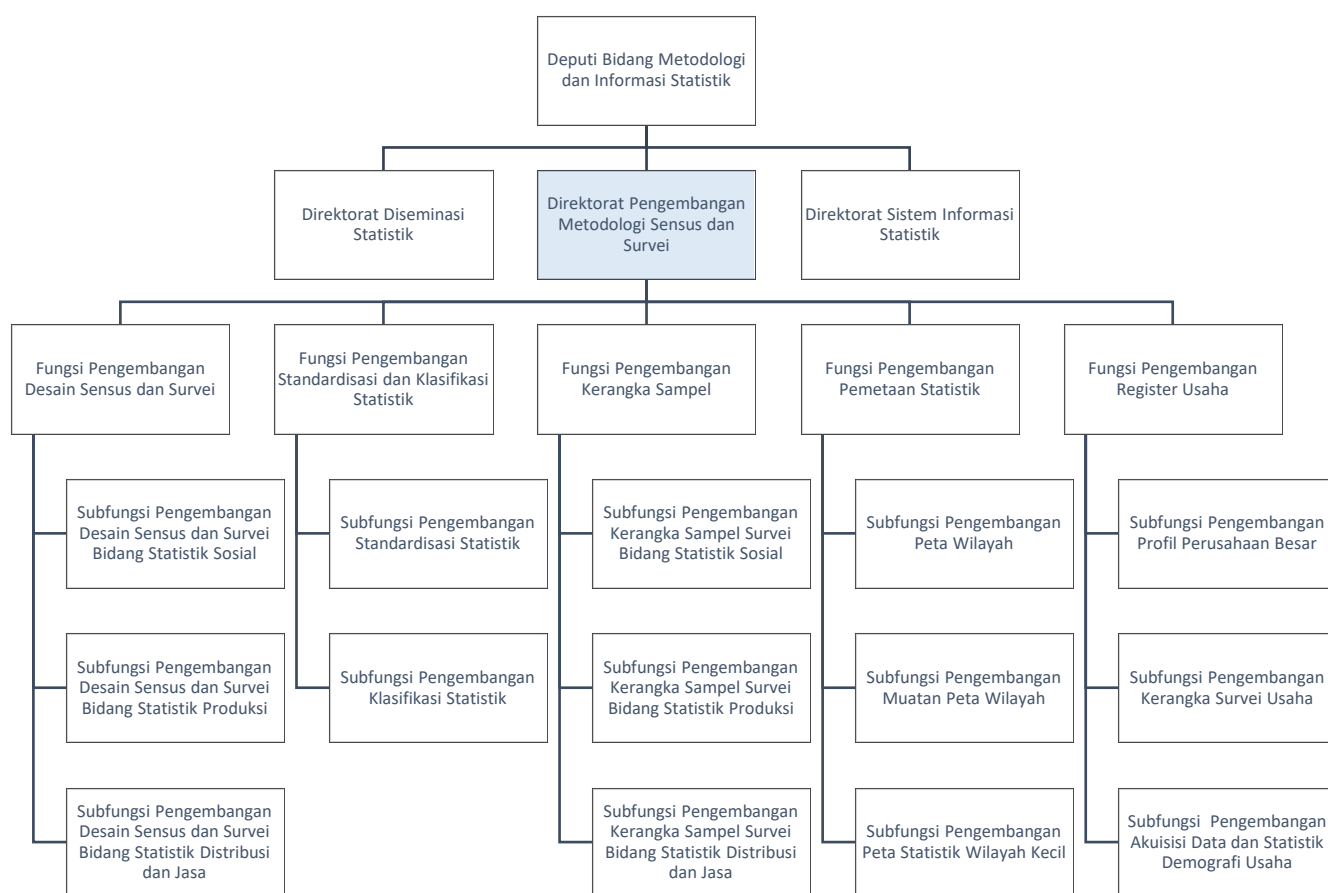
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI



Lampiran 2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi :

1. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI).
2. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas.	Meningkatkan kualitas perencanaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien.
	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat. Meningkatkan penggunaan daftar induk dan kode referensi dalam kegiatan statistik di Indonesia.
	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia	Meningkatkan penggunaan standar data, termasuk klasifikasi statistik, yang berkualitas dalam kegiatan statistik di Indonesia

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat
	Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)	Penyediaan publikasi <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA).	Menyediakan publikasi <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)
Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	- Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Mengembangkan sistem/aplikasi untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik; - Meningkatkan sistem kerja melalui kebijakan reward and punishment dalam rangka menciptakan penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Penyelenggaraan kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	- Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Meningkatkan koordinasi antar kedeputian, direktorat, dan daerah dalam perencanaan sensus dan survei; dan - Meningkatkan penerapan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Lampiran 3. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PMSS 2020-2024

INDIKATOR 1.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien menghasilkan data berkualitas (%)	Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menghasilkan desain sensus dan survei serta ukuran sampel minimum yang andal, efektif, dan efisien. Desain sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien merupakan rancangan sensus dan survei yang tepat dan mampu memotret fenomena pada suatu domain sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jumlah desain sensus dan survei yang dihasilkan oleh PMSS / jumlah permintaan desain × 100) + 50% (Jumlah penghitungan ukuran sampel minimum yang dihasilkan / jumlah permintaan penghitungan ukuran sampel minimum × 100) Rumus: $I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$ Keterangan: D= Desain sensus dan survei yang dihasilkan D_R= Desain sensus dan survei yang diminta S= Ukuran sampel minimum yang dihasilkan S_R= Ukuran sampel minimum yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur tingkat penyediaan desain sensus dan survei dalam upaya mendukung SSN dan mengetahui tingkat penyekenggaraan sensus dan survei dalam penerapan GSBPM
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Jumlah naskah desain survei, tabel ukuran sampe minimuml, dokumen permintaan rancangan desain, dan ukuran sampel minimum suatu survei.
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Indikator menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan kerangka sampel yang akurat pada survei yang menerapkan probability sampling. Kerangka sampel yang akurat merupakan daftar unit populasi yang lengkap dan mutakhir.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan/ Jumlah permintaan dokumen kerangka sampel × 100 % Rumus: $I_2 = \left[\left(\frac{d}{d_R} \times 100\% \right) \right]$ Keterangan: <i>d</i> = Dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan <i>d_R</i> = Dokumen kerangka sampel yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur penyediaan kerangka sampel untuk survei yang menerapkan probability sampling
	SUMBER DAN CAR PENGUMPULAN DATA
	Daftar sampel survei, dokumen kerangka sampel
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 3.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	BPS (PMSS) sebagai pembina data wajib menyediakan standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan) yang bersifat lintas instansi. Pengembangan klasifikasi dapat dibuat sebagai pengembangan terpisah.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak Rumus: $I_3 = \sum p$ Keterangan: p= Publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak
	MANFAAT
	Menjaga keterpaduan dan keterbandingan data yang dihasilkan produsen data baik internal maupun eksternal BPS
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Publikasi resmi standar data statistik dan publikasi resmi klasifikasi statistic
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Berkala

INDIKATOR 4.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas. Master dan peta yang mutakhir mencakup jumlah wilayah yang mutakhir berdasarkan Perka Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik kondisi terkini, sedangkan kualitas mencakup perbaikan batas dan akurasi peta wilkerstat.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jml master wilkerstat diupdate/jml pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan x 100) ditambah 50%x (Jml peta yang diupdate/jml master wilkerstat yang diupdate x 100) Rumus: $I_4 = \left[\left(50\% \times \frac{JW_u}{JW_l} \right) + \left(50\% \times \frac{JP_u}{JP_l} \right) \right] \times 100\%$ Keterangan: JW_u = Jumlah master Wilkerstat yang diupdate JW_l = Jumlah pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan JP_u = Jumlah peta yang diupdate
	MANFAAT
	Mengukur tingkat penyediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas untuk mendukung kegiatan sensus dan survei, serta menjaga kesesuaian antara master wilkerstat dan petanya.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Master wilayah kerja statistik yang dimutakhirkan melalui sistem pemutakhiran MFD dan MBS. Peta yang dimutakhirkan baik secara pemutakhiran kuantitas (mengikuti pemutakhiran wilayah) dan kualitas
	DISAGREGASI
	PMSS
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 5.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi pengembangan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (MSA)	Indikator ini menggambarkan jumlah publikasi pengembangan metodologi terbaru (MSA dll)
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: =Jumlah publikasi yang diterbitkan Rumus: $I_3 = \sum p$ Keterangan: p= Publikasi/laporan yang diterbitkan
	MANFAAT
	Mendukung major project pembangunan nasional (pembangunan wilayah metropolitan)
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	- publikasi MSA
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 6.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani.	Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (<i>technical assistance</i>).
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: (Jumlah permintaan pembinaan bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani / jumlah total permintaan pembinaan) x 100%. Rumus: $I_{5.1} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ Keterangan: p^* = permintaan pembinaan yang dilayani p = total permintaan pembinaan
	MANFAAT
	Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	- surat undangan, - surat permintaan koordinasi
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 6.2.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: (Jumlah permintaan kerja sama yang dilayani / Jumlah total permintaan kerja sama) x 100%. Rumus: $I_{5.2} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ Keterangan: p^* = permintaan kerja sama yang dilayani p = permintaan kerja sama
	MANFAAT
	Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	- surat undangan, - surat permintaan kerjasama,
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2021

PENGUKURAN KINERJA SASARAN DIREKTORAT PMSS TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas						Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100	100	100,00	
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100	105,88	105,88	
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/Laporan	4	4	100,00	
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100,00	
Tersedianya data statistik untuk pengembangan wilayah metropolitan	Jumlah publikasi pengembangan Metropolitan Statistical Area (MSA)	Publikasi	2	2	100,00	
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data						
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00	
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00	

Lampiran 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2021)

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN
(KONDISI DESEMBER 2021)**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Fungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei	2	4	9	1	-	-	-	16
3	Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik	-	4	7	1	2	-	-	14
4	Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel	-	3	9	1	-	-	-	13
5	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	-	9	7	-	-	-	-	16
6	Fungsi Pengembangan Register Usaha	-	2	3	-	-	-	-	5
Jumlah		3	22	35	3	2			65

Lampiran 6. Mailing List Publikasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2021

MAILING LIST PUBLIKASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
TAHUN 2021

No	Judul Publikasi	Instansi BPS	Instansi Dalam Negeri	Instansi Luar Negeri	Perguruan Tinggi	Perpus Nasional/ Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laporan Analisis <i>Post Enumeration Survei</i> Sensus Penduduk 2020	27	-	-	-	-	27
2	Laporan Pelaksanaan <i>Post Enumeration Survei</i> Sensus Penduduk 2020	27	-	-	-	-	27
3	Publikasi Tabel Kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 – KBLI 2015	73	27	-	-	-	100

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp: 021 3841195, 3842508, 3810291, Faks: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id